

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI DESA PATONGLOAN KECAMATAN BAROKO
KABUPATEN ENREKANG**



**LUKMAN
2014.235.00.140**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA
PATONGLOAN KECAMATAN BAROKO
KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan diajukan oleh

**LUKMAN
2014.235.00.140**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Administrasi Publik**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2017**

S K R I P S I
LEMBAR PENGESAHAN

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA PATONGLOAN KECAMATAN BAROKO
KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan Diajukan Oleh

LUKMAN

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014.235.00.140

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Tanggal 12 Desember 2017
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,

Deasy Mauliana, SH., MH.

Pembimbing

Mengetahui,
Ketua STIA LAN Makassar

Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph. D.

NIP. 19640706 199303 1 001

SKRIPSI
PENGESAHAN

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI
DESA PATONGLOAN KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan Diajukan Oleh

LUKMAN

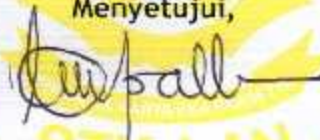
Nomor Pokok Mahasiswa : 2014.235.00.140

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Tanggal 12 Desember 2017

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,



Deasy Mauliana, SH., MH

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua STIA LAN Makassar



Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D.

NIP. 19640706 199303 1 001

SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**JUDUL : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA PATONGLOAN
KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG.**

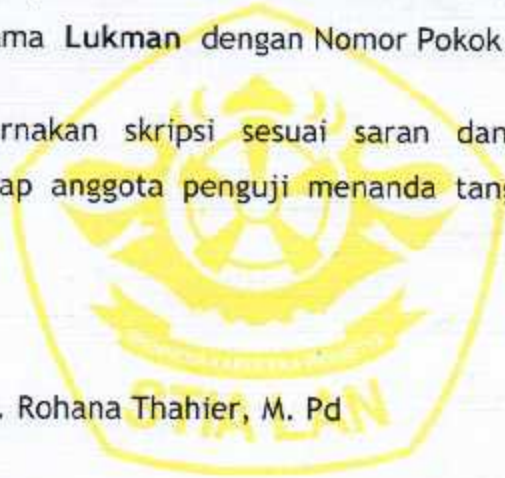
Pada hari ini, Selasa, 12 Desember 2017 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas nama **Lukman** dengan Nomor Pokok 2014.235.00.140


Telah menyempurnakan skripsi sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menanda tangani persetujuan di bawah ini :


Ketua Tim : Dr. Rohana Thahier, M. Pd

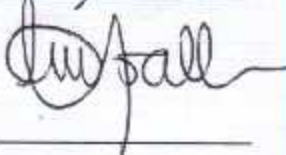
Sekretaris : Irawaty Amir, SE., M.M

Anggota : Deasy Mauliana, SH., MH









SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya :

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI, saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (S1) di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 12 Desember 2017

Yang menyatakan,



NPM. 2014. 235 .00. 140

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
INTISARI	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Akademik.....	7
2. Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Teori.....	9
1. Konsep Administrasi Pembangunan	9
2. Konsep Pembangunan	18
3. Konsep Partisipasi	22
4. Konsep Model Partisipasi	27
5. Konsep Perencanaan	29
6. Konsep Pembangunan.....	34
7. Konsep Perencanaan Pembangunan	37
8. Konsep Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah	38
9. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	41
B. Hasil Penelitian yang Relevan	44
C. Deskripsi Fokus Penelitian	47
D. Kerangka Konsep	49
E. Pertanyaan Penelitian	50
BAB III DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN.....	53
A. Pendekatan Penelitian	53
B. Desain Penelitian	53

C. Sumber Data	53
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	55
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	57
F. Keabsahan Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	62
A. Deskripsi Singkat Lokus/Objek Penelitian	62
B. Karakteristik Sumber Data.....	65
C. Paparan dan Reduksi Data	69
D. Hasil Analisis Data	99
BAB V PEMBAHASAN	116
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tahapan partisipasi dalam pembangunan.....	51
Tabel 2 Jumlah penduduk Desa Patongloan	65
Tabel 3 Kelompok usia Desa Patongloan	66
Tabel 4 Tingkat pendidikan Desa Patongloan	67
Tabel 5 Jenis pekerjaan masyarakat Desa patongloan.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir	50
Gambar 2 Peta Desa Patongloan	62
Gambar 3 Struktur Organisasi Perangkat Desa Patongloan	64
Gambar 4 Matriks RPJMDesa Patongloan	71
Gambar 5 Data Masalah Desa	73
Gambar 6 Pelaksanaan assessment dalam rangka penetapan masalah.....	75
Gambar 7 Daftar hadir peserta dalam pengumpulan data	76
Gambar 8 Musyawarah RKPDesa	80
Gambar 9 Musrenbang Desa	82
Gambar 10 Daftar hadir peserta musrenbang	84
Gambar 11 Rabat brton jalan desa	92
Gambar 12 Daftar pekerja rabat beton jalan	93
Gambar 13 Rabat beton jalan tani	98
Gambar 14 Musyawarah evaluasi program pembangunan	99

INTISARI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PATONGLOAN KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG

Penulis : Lukman
Penasehat : Deasy Mauliana

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Apakah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang telah berbasis partisipasi masyarakat, dan bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan melalui proses wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada informan. Temuan hasil penelitian ini yaitu dari indikator partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa pada tahap *assessment*, tahap perencanaan alternatif, tahap pelaksanaan program, dan tahap evaluasi.

Hasil penelitian adalah pada tahap *assessment* terlihat partisipasi masyarakat dapat dikatakan baik yakni masyarakat telah peka terhadap fenomena serta realita yang sedang terjadi disekitar mereka. Pada tahap perencanaan alternatif program melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua. Pada tahap pelaksanaan bisa dikatakan pemerintah berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada tahap evaluasi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sudah sangat baik, mereka ikut menikmati serta menjaga hasil-hasil pembangunan Desa.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten.

ABSTRACT

SOCIETY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT PLANNING IN THE VILLAGE PATONGLOAN BAROKO SUB-DISTRICT OF ENREKANG DISTRICT

Author : Lukman
Supervishors : Deasy Mauliana

The main problem in this research is whether development planning implemented in Patongloan Village, Baroko District, Enrekang Regency has been based on community participation, and aims to know the community participation in development planning in Patongloan Village, Baroko Sub-district, Enrekang District.

In this research using qualitative research methodology through interview and observation process. The interview was conducted by direct questioning to the informant. The findings of this study are the indicators of community participation in village development planning at the assessment stage, alternative planning stage, program implementation stage, and evaluation phase.

The result of the research is at the evaluation stage, it can be seen that community participation is good, that the society has been sensitive to the phenomenon and the reality that is happening around them. At the alternative planning stage the program engages in deep ideas by involving the community as a whole so that all the needs of the community can be accommodated. At the implementation stage can be said the government succeeded in improving public participation. At the community evaluation stage of the government in the implementation of the development has been very good, they come to enjoy and keep the results of village development.

Keywords: Society Participation, Planning Development, District Government.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa pemerintahan orde baru, pelaksanaan pembangunan Indonesia dilakukan secara sentralistik, yang meletakkan pemerintah pusat sebagai pemrakarsa, perencana, dan pelaksana tunggal pada pembangunan Negara. Daerah tidak dijadikan sebagai pelaku pembangunan, melainkan sebagai objek daripada pembangunan itu.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang sebagaimana dijelaskan dalam UU. No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, perlu adanya kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah kabupaten dan kota dalam memberikan sentimen positif kepada penampungan aspirasi-aspirasi masyarakat lokal. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif yang menuntut adanya ruang terbuka bagi masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan.

Indonesia sebagai Negara yang demokratis melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang lebih demokratis, lebih terbuka, dan lebih partisipatif dan berinisiatif, yang dimana masyarakat semakin dituntut oleh arus globalisasi yang begitu cepat untuk merubah pemikiran dan perilaku saat ini dengan inovasi teknologi informasi. (UU No.23 Tahun 2004) Sekalipun daerah diberi kebebasan untuk menentukan

kebijakan pembangunan daerahnya sendiri, namun konsep pembangunan daerah harus tetap berada pada lingkup pembangunan nasional yang merupakan akumulasi dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan harus mencakup seluruh wilayah dan menyentuh semua strata masyarakat serta segala aspek kehidupan baik itu dalam aspek social, politik, ekonomi, budaya, ideologi maupun stabilitas bernegara.

Pembangunan daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Maka untuk tercapainya keberhasilan pembangunan, segala aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah yang nantinya akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Dalam sebuah pembangunan, perencanaan merupakan syarat bagi terlaksananya pembangunan yang baik. Akan tetapi, perencanaan yang matang belum tentu membuat pembangunan itu berhasil apabila pada pelaksanaan kegiatannya masih sering timbul hal-hal yang dapat menghambat proses pembangunan. Hambatan-hambatan tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pembangunan sebagai sebuah perubahan yang membawa ke arah yang lebih baik butuh perencanaan agar tujuan yang diinginkan tepat sasaran. Perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam tujuan bernegara

adalah ingin memajukan kesejahteraan umum yang direalisasikan melalui proses pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dalam mempertahankan kesatuan. Untuk melihat hal ini perlu diperhatikan mekanisme, struktur dan proses yang dijadikan acuan dasar dari perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan nasional serta bagaimana kaitannya. Dalam pengertiannya perencanaan pembangunan nasional adalah upaya untuk menyiapkan dan mengarahkan secara sistematis kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pembangunan secara nasional yang meliputi usaha mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisa data dari kondisi ekonomi, politik, social budaya dan hankam serta masalah-masalah yang mungkin ditimbulkan (Riyadi, 2004:23).

Perlunya keterlibatan masyarakat dianggap sangat penting dalam perencanaan pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan nantinya akan lebih tepat sasaran. Partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan di Negara-negara yang menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia bukanlah hal yang baru. Pada saat ini partisipasi dipandang sebagai proses mobilisasi yaitu pergerakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan tidak hanya dipusatkan oleh partisipasi masyarakat atau pemerintah. Namun kedua pihak bersama-sama merumuskan suatu perencanaan sehingga menghasilkan perencanaan yang baik bagi semua pihak. (Tapparang, 2010:94)

Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional, sehingga perencanaan bertujuan untuk

menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcomes atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Jadi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Partisipasi diberi makna sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses politik yang seluas-luasnya baik dalam proses pengambilan keputusan dan monitoring kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka.

Berbagai peraturan yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat secara substantif belum mengatur bagaimana partisipasi masyarakat itu dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila model ini diterapkan dalam upaya implementasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, maka yang diperlukan adalah keterbukaan untuk menjadikan masukan masyarakat sebagai dasar dalam penentuan kebijakan. (Tapparang, 2010) Nelson dan White (1982, 206) menyebut dua macam partisipasi, *pertama*, partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakannya partisipasi horizontal, dan *kedua*, partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antar klien dengan patron, atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, yang diberi nama partisipasi vertikal. Keterlibatan dalam berbagai kegiatan politik seperti

pemberian suara dalam pemilihan, kampanye, dan sebagainya, disebut partisipasi dalam proses politik, sedangkan keterlibatan dalam kegiatan seperti perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disebut partisipasi dalam proses administrasi.

Sulit untuk dipungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan, akan tetapi bagaimanapun juga dalam pembuatan kebijakan yang mengacu pada kepentingan masyarakat sudah semestinya pemerintah melibatkan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan alat ampuh dalam menentukan arah kebijakan pembangunan pada masa yang akan datang. Keterlibatan ini akan memberikan dampak positif terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil atau yang akan diimplementasikan, karena dapat membangun sinergi antar pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian Chambers (1996:57) menyimpulkan bahwa legitimasi dan keberhasilan dari suatu program pembangunan dalam skala nasional bagi suatu Negara berkembang, program yang dilakukan dengan memperhatikan situasi dilaksanakan dari bawah ke atas (*bottom-up*), dan program tersebut sesuai bagi rakyat, ketimbang dilakukan secara seragam (*top-down*) dengan program yang didominasi oleh pemerintah pusat.

Dalam menunjang pembangunan suatu daerah, maka visi dan misi yang harus dicapai adalah peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perlunya keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat yang tertuang dalam UU No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dimana masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya mekanisme perencanaan pembangunan yang berupa musyawarah

perencanaan pembangunan, masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam lingkup tingkat kelurahan ataupun tingkat kecamatan.

Kecamatan Baroko merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang yang telah melaksanakan proses mekanisme perencanaan pembangunan daerah, dimana secara formalitas masyarakat berpartisipasi dalam proses Musrenbang karena menurut mereka bahwa mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang mengikutsertakan masyarakat dapat bermanfaat untuk memberikan masukan mengenai permasalahan yang terdapat di daerah tersebut.

Pertanyaan yang kemudian muncul di Kabupaten Enrekang khususnya di Desa Patongloan, Kecamatan Baroko adalah apakah dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan telah menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek pembangunan sesuai dengan model "*bottom-up*". Dalam proses mekanisme perencanaan pembangunan bukan hanya sekedar antusias kehadiran masyarakat dalam Musrenbang, tetapi kemudian bagaimana kepentingan mereka direspon oleh pemerintah. Maka wajar saja bila muncul pertanyaan apakah selama ini pelaksanaan Musrenbang hanya sekedar rutinitas dari sistem yang harus atau wajib dilaksanakan atau Musrenbang telah menghasilkan sesuatu yang berpihak pada masyarakat.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat disajikan adalah “Apakah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang telah berbasis partisipasi masyarakat?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis (teoritis) maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran (ilmiah) dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen perencanaan pembangunan daerah, khususnya berkaitan dengan perencanaan partisipatif dalam pembangunan dan sebagai referensi pembanding bagi peneliti lain

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada Pemerintah Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Erekan di dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah mengingat di dalam penelitian ini berusaha diungkap berbagai kendala

yang dihadapi dan sekaligus solusi yang dapat ditempuh Pemerintah Desa Patongloan Kecamatan Baroko Daerah Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan- keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2009:4). The Liang Gie (dalam Pasolong, 2011:3) mendefenisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Pasolong (2011:3) administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsure-unsur.

Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efisien , efektif dan rasional sedangkan dimensi unsur-unsur administrasi yaitu: adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai. Pembangunan menurut Siagian (2009:4) didefenisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian

pembinaan bangsa (*nation-building*). Selanjutnya ia berpendapat paling sedikit tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multi dimensional, semua hal yang disinggung di tujukan kepada usaha pembinaan bangsa. Sebagai suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah “bagaimana” meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat dikatakan sebuah kebijakan (Suharto, 2006:4). Selanjutnya Todaro (dalam Suharto, 2006:3) mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barangg kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.

- b. Menacapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan.
- c. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan. Dapat dipahami bahwa proses pembangunan dapat diupayakan kearah yang positif serta lebih maju dari sebelumnya.

Dalam membangun tentunya tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Perlu usaha-usaha secara sadar, pengorbanan dan proses yang memakan waktu serta harus dilalui dengan kerjasama semua pihak yang terlibat. Upaya-upaya sadar yang dikaitkan dengan negara untuk melakukan perbaikan dikenal dengan administrasi pembangunan. Siagian (2009:5) mendefenisikan administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Menurut Mostopadidjaya dalam Afiffudin (2010:51) menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Dari pengertian administrasi pembangunan diatas dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat. Afiffudin (2010:64) fokus analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, meghadapi tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Disiplin ilmu administrasi pembangunan memiliki cirri-ciri yang membedakan dengan disiplin Ilmu-ilmu yang lain adalah :

- a. Orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik
- b. Administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Jika dimasukkan administrasi pembangunan dalam konteks idea menurut Siagian maka dapat dipahami administrasi pembangunan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh desa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan desa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Kegiatan pembangunan di desa dalam Jayaditana (2006:87) meliputi bidang ekonomi, sosial, fisik dan prasarana dan pemerintahan. Administrator adalah orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur. Ia

merumuskan tujuan dan kebijakan yang berlaku umum dan menjadi dasar atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional (Silalahi, 2002:21). Jadi administrator pembangunan dapat diartikan secara sederhana yaitu orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur yang merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam kegiatan pembangunan. Sesuai dengan penelitian ini maka kedudukan dan posisi puncak yang dimaksud adalah kepala desa. Kepala desa sebagai administrator pembangunan harus mampu mengemban amanah untuk memperbaiki keadaan desa dengan berbagai program yang sifatnya membangun.

Menurut Kartono (2006:325) administrator pembangunan bertugas melakukan rentetan usaha bersama rakyat atau masyarakat dalam iklim demokratis untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan tata kehidupan serta sarana kehidupan, demi pencapaian kesejahteraan, kebaikan serta keadilan merata. Administrator pembangunan dalam kaitan menjalankan tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Suharto (2006:7) kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam pencapaian tujuan tertentu. Pelaksanaan kebijakan dapat berupa program- program yang disusun. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai program. Fungsi kebijakan disini adalah untuk memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program- program pelayanan yang efektif. Otonomi Desa Dalam membicarakan masalah

otonomi, desa menjadi bagian tak terpisahkan. Otonomi desa yang dikenal sebagai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pernyataan tentang derajat kebebasan dalam pengelolaan sumber daya alam yang bermanfaat dan sumber daya manusia yang ikut serta membangun desa. Kata desa sendiri berasal dari bahasa india yakni “swadesi” (dalam Wasistono, 2007:7) yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Desa adalah suatu wilayah yang didiami sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan, yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri dan secara administrative berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota (Nurcholis, 2011:4). Selanjutnya soetadjo dalam Nurcholis (2011:12) menjelaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang juga mengatur mengenai desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada dalam kabupaten.

Pembangunan Desa Hakikat dari konsep pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan pokok pembangunan di mana pembangunan itu harus memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tjokroamidjojo (2013:525), mengatakan bahwa pembangunan adalah proses atau usaha-usaha perubahan-perubahan sosial tersebut dapat berarti suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya Nugroho (2004:26) pembangunan mempunyai arti yaitu suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasilnya merata serta berkeadilan. Pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan adalah pembangunan bangsa (nation building) atau perkembangan sosial ekonomi.

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pembangunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat untuk mencapai suatu kondisi dan situasi yang lebih baik yang meliputi bidang aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Dari pendapat-pendapat diatas, jelas bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat dimana masyarakat terlibat baik dalam perencanaannya, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi pembangunan. Sedangkan pembangunan desa di tinjau dari sudut

geografis, adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan dari unsur-unsur fisiografis sosial, politik, ekonomi, kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu pasal 1 ayat 5 menegaskan bahwa yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Siagian (2003:108), Pembangunan Desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa. Menurut Nugroho (2004:36), Desa adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada unit terendah yang harus dilaksanakan terus menerus, secara sistematis dan terarah sebagai satu kesatuan dengan pembangunan regional dan nasional. Menurut Adisasmita (2006:2) pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat. Selanjutnya Adisasmita menyebutkan tujuan umum dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar dan terus menerus melalui tahapan-tahapan tertentu berdasarkan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat desa. Menurut Ndraha (1994:23) ciri-ciri khas yang diperoleh dari gambaran khas pembangunan desa adalah:

1. Membangun masyarakat desa berarti membangun masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.
2. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat desa bersangkutan dalam proses pembangunan proyek, pembangunan itu bukanlah pembangunan desa.
3. Metode pendekatan pembangunan desa adalah metode yang telah disesuaikan dengan kondisi-kondisi psikologis, sosial dan ekonomi pada setiap lingkungan kebudayaan dimana desa berada.
4. Proses pembangunan desa adalah usaha berencana dan diorganisasikan guna membantu anggota masyarakat untuk memperoleh sikap, keterampilan dan pengertian yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
5. Pembangunan masyarakat bermaksud membangun rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri.
6. Pembangunan masyarakat berarti pembangunan swadaya, mengintensifkan partisipasi masyarakat, meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat untuk selanjutnya dapat berkembang sendiri meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat.
7. Membangun pedesaan berarti juga membangun prakarsa dan lingkungan yang serasi.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi pula reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pembangunan mempunyai tujuan meningkatkan sosial ekonomi.

Defenisi di atas memberikan penjelasan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas yakni cara hidup lebih baik daripada yang sebelumnya mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.

2. Konsep Pembangunan Desa

A Surjadi (dalam Nugroho, 2004: 46) mengemukakan bahwa pembangunan desa adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dari seluruh masyarakat dengan demokratisasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif ini tidak datang, maka diperlukan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya kegiatan dan respon yang antusias itu dapat terjamin.

Dari beberapa pendekatan di atas pembangunan desa dapat dikemukakan :

- a. Pembangunan desa yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah suatu pembangunan akan langsung menyentuh kebutuhan sebahagian besar rakyat Indonesia, di mana lebih dari 80% penduduk Indonesia bermukim di pedesaan.
- b. Pembangunan desa mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat desa, dan terdiri atas sektor dan program yang saling berkaitan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah melalui berbagai departemen dan non departemen dengan aparatnya di daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- c. Pembangunan desa mempunyai makna yang lebih hakiki bagi masyarakat Indonesia karena dalam realisasi fisiknya justru bersifat menyeluruh dan menyebar luas ke seluruh pelosok

pedesaan serta dengan menggali segala potensi dengan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memadukannya.

- d. Pembangunan desa mempunyai arti yang sangat strategis dalam rangka pembangunan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Ini dapat diartikan sebagai titik sentral dari pembangunan nasional, karena pembangunan desa merupakan pembangunan yang langsung bersangkutan dengan masyarakat yang berada di pedesaan. Semua jenis pembangunan, baik pembangunan sektoral, pembangunan regional maupun pembangunan khusus (inpres), semuanya diarahkan ke pedesaan.
- e. Pada akhirnya pembangunan desa tidak mungkin hanya dilakukan oleh sepihak saja tanpa koordinasi dan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah sampai pemerintah desa. Dari sini pulalah perlu inisiatif bahwa, beban dan tanggung jawab pembangunan bukanlah tugas ringan, justru berhasil tidaknya pembangunan desa akan berakibat langsung kepada kehidupan dan penghidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Dengan melihat pendekatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh warga desa maka pembangunan desa dapat dilihat sebagai suatu proses. dikatakan sebagai proses karna diperlihatkan oleh jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara yang

tradisional ke arah yang lebih baik maju dan lebih menekankan kepada aspek perubahan yang terjadi pada masyarakat.

Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien (Kartono, 2002:53). Beberapa sasaran yang dapat dikembangkan atau dicapai dalam suatu pembangunan desa adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan Ekonomi kerakyatan

Pembangunan ekonomi kerakyatan pada intinya adalah mengelolah seluruh potensi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip atau ekonomi kerakyatan. Program-Program pembangunan ekonomi kerakyatan yang dapat dikembangkan di desa adalah :

- a) Program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan dengan kegiatan berupa penyediaan kredit tanpa bunga.
- b) Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan dan peternak.
- c) Pengembangan dan pemberdayaan koprasi serta pengusaha mikro kecil dan menengah melalui pembinaan pengusaha kecil, pengembangan industri kecil dan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi desa.
- d) Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menuju industri kecil perdesaan.

2) Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Handal

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan desa. Semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu desa. Program-Program yang dapat dikembangkan diantaranya:

- a) Program pengembangan pendidikan
- b) Program peningkatan pelayanan kesehatan
- c) Pembinaan generasi muda. seni budaya, pemuda dan olahraga
- d) Program perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja.
- e) Pembinaan kehidupan beragama.
- f) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat.

3) Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM. Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan

ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Dari penjelasan di atas, peneliti memfokuskan pembangunan desa pada pembangunan non fisik yang lebih difokuskan pada pengembangan ekonomi kerakyatan dan sumber daya manusia yang handal.

Pembangunan pertanian tidak terlepas dari pengembangan kawasan pedesaan yang menempatkan pertanian sebagai penggerak utama perekonomian desa. Lahan, potensi tenaga kerja, dan basis ekonomi keluarga pedesaan menjadi faktor utama pengembangan pertanian.

Ada beberapa alasan mengapa harus dilakukan pembangunan pertanian yaitu sebagai berikut :

- 1) Selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari terciptanya laju pertumbuhan perekonomian yang tinggi di mana alat yang dipergunakannya adalah dengan mendorong industrialisasi di kawasan-kawasan perkotaan. Kondisi ini bila ditinjau dari pemerataan pembangunan telah memunculkan kesenjangan antara kawasan pedesaan dan perkotaan karena sektor strategis yang didorong dalam proses industrialisasi hanya dimiliki oleh sebagian masyarakat (Sastropetro, 1988:115);
- 2) Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang diperkirakan pada tahun 2035 akan bertambah menjadi dua kali lipat dari jumlah saat ini atau menjadi 400 juta jiwa, telah memunculkan kerisauan akan terjadinya keadaan “rawan pangan” di masa yang akan datang. Selain itu, dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan

masyarakat terjadi pula peningkatan konsumsi perkapita untuk berbagai jenis pangan, akibatnya dalam waktu beberapa tahun yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan yang lebih dari 2 kali lipat jumlah kebutuhan saat ini (Muluk, 2007:65) ;

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, karena menurut Sirajuddin (1991:87) “petani sangat identik dengan kemiskinan dan kemiskinan itu paling banyak ditemukan di desa.”

3. Konsep Partisipasi

Beberapa hal yang dianggap penting untuk dibahas di dalam penelitian ini antara lain: Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. (Poerwadarminto. 2007: 243).

Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Bentuk lain dari partisipasi masyarakat adalah seperti yang dikemukakan oleh Robert (dalam Soemarmo, 2005:49). Robert (1996:114) pada dasarnya sependapat dengan Geddesian (2005:94). Ia mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat pada dasarnya diperlukan sejak awal dalam perencanaan pembangunan.

Abe (2002 : 81) mengemukakan pengertian perencanaan partisipatif sebagai berikut: “perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.” Lebih lanjut Abe mengemukakan langkah-langkah dalam perencanaan partisipatif yang disusun dari bawah yaitu:

- 1) Penyelidikan, adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat local yang berkembang di masyarakat.
- 2) Perumusan masalah, merupakan tahap lanjut dari proses penyelidikan. Data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam.
- 3) Identifikasi daya dukung, dalam hal ini daya dukung diartikan sebagai dana konkrit (uang) melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan target yang telah ditetapkan.
- 4) Rumusan Tujuan Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya.

- 5) Langkah rinci Penetapan langkah-langkah adalah proses penyusunan apa saja yang akan dilakukan. Proses ini merupakan proses membuat rumusan yang lebih utuh, perencanaan dalam sebuah rencana tindak.
- 6) Merancang anggaran, disini bukan berarti menghitung uang, melainkan suatu usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia.

Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisi obyektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan merupakan suatu kebutuhan. Hal ini sejalan sebagaimana dinyatakan Tjokroamidjojo (1998:98) bahwa guna mencapai keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan berikut: (1) Keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah; (2) Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk di dalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab. Pembangunan, yang dapat dilakukan dengan sumbangan memobilisasi pembiayaan pembangunan, melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain; (3) Keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

Pandangan Tjokroamidjojo di atas mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pembangunan pada prinsipnya merupakan tahapan pengambilan keputusan tentang rencana yang dilakukan. Tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan yaitu menerima manfaat secara proporsional, dan mengawasi program pembangunan yang dilaksanakan. Dengan perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, berarti sudah mempertimbangkan kebutuhan dan Situasi lingkungan masyarakat. Hal ini penting dalam tahapan proses selanjutnya,

dimana masyarakat akan melaksanakan program yang direncanakan. Jika mereka merasa ikut memiliki dan merasakan manfaat program tersebut, maka diharapkan masyarakat dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap program, sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat lebih dihindarkan, guna mencapai keberhasilan pembangunan sesuai tujuan yang telah direncanakan.

Menurut Adisasmita (2001:206-207) menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan diatas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu:

1) Partisipasi dalam perencanaan

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan.

Segi positif dari Partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Pandangan Adisasmita (2001:207) yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa hanya pada tahap perencanaan dan

pelaksanaan program pembangunan nampaknya belum lengkap guna menjamin kesinambungan pencapaian tujuan pembangunan desa. Menurut Adisasmita (2001 : 208), dalam perkembangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan suatu komunitas, belumlah cukup hanya melihat partisipasi masyarakat hanya pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat hendaknya pula meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak diarahkan (*non direktif*), sehingga partisipasi masyarakat meliputi proses-proses:

a) Tahap *Assesment*

Tahap *assessment* merupakan proses pengumpulan, penganalisaan dan mensistesisakan data kedalam suatu formulasi yang menekankan dimensi vital, seperti perhatian khusus terhadap peran-peran masyarakat dan hal-hal penting lainnya yang sulit dijalankan. Tahap *assessment* dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki.

b) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan.

Tahap perencanaan alternatif program dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memberikan beberapa alternatif program.

c) Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan.

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan keikutsertaan

masyarakat untuk membantu baik berupa materi maupun non materi agar suatu pembangunan yang ingin dilakukan bisa terlaksana dengan baik dan cepat.

- d) Tahap evaluasi (termasuk didalamnya evaluasi input, proses dan hasil).

Evaluasi pada program pembangunan memang seharusnya dilakukan minimal setahun sekali, guna untuk mengetahui perubahan pembangunan baik itu bersifat fisik maupun nonfisik.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dilihat bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat bersama-sama pihak terkait lainnya dalam berbagai tahapan pembangunan akan menghasilkan konsensus dalam kebijakan pembangunan, dan sekaligus melatih masyarakat menjadi lebih pandai khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang muncul di masyarakat.

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung pula oleh masyarakat.

4. Konsep Model Partisipasi

Seperti yang telah jelaskan sebelumnya bahwa Nelson Bryant dan White (1982: 206) dalam Ndraha menyebutkan dua macam partisipasi, *pertama*, partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakannya partisipasi horizontal, dan *kedua*, partisipasi yang

dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antar klien dengan patron, atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, yang diberi nama partisipasi vertikal.

Namun berdasarkan pengertian partisipasi menurut Tapparang (2010:94), partisipasi dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Model partisipasi otonom
- b. Model partisipasi mobilisasi

Huntington dan Nelson (2001:45) masih melihat adanya model partisipasi yang di mobilisasi dalam arti masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga secara bersama-sama dilibatkan dalam satu kegiatan, dan ada juga model partisipasi otonom, dimana masyarakat secara sukarela memberikan inisiatif dan prakarsanya dalam suatu kegiatan.

Selanjutnya Tjokroamidjojo (1998:222), mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus memperhatikan 4 aspek yaitu:

- a. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu Negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dalam masyarakat demokratis maka arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat. Cermin dari kepentingan masyarakat ini dilakukan melalui partisipasi rakyat di dalam keterlibatan politik mereka dalam proses politik. Pengembangan keterlibatan dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan ini tidak saja ditekankan oleh suatu organisasi seperti PBB, tetapi juga seorang ahli seperti Waldo.
- b. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya. Oleh karena itu pada umumnya pemerintah perlu memberikan pengarahannya mengenai tujuan dan cara-cara mencapai tujuan pembangunan tersebut.
- c. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik. Dalam hal ini tergantung system dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku bagi suatu Negara. Ada kalanya pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih bersifat mobilisasi dari pada partisipasi.

- d. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana. Program-program ini pada suatu tertentu memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka, dan juga secara langsung melaksanakan sendiri serta memetik hasil program tersebut.

Menurut Bryant dan white dan korten dan Klaus dalam Efendi (1986:215), bahwa: “Partisipasi masyarakat ini akan memungkinkan mereka untuk membantu menentukan masalah-masalah yang akan dipecahkan dalam pembangunan. Partisipasi ini juga akan memungkinkan masuknya informasi yang lebih banyak dari lapangan yang berguna bagi penentuan strategi pembangunan akan dapat digerakkan dengan partisipasi”. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tentu harus dimulai dari tahap perencanaan, sehingga masyarakat dapat menentukan arah dan keinginannya dari program-program pembangunan tersebut.

5. Konsep Perencanaan

a. Pengertian Perencanaan

Menurut Kunarjo (2002:14) pada dasarnya secara umum perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian tertentu. Dengan definisi tersebut, maka perencanaan mempunyai unsur-unsur: (1) Berhubungan dengan hari depan, (2) Mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis, dan (3) Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Siagian (1989 :50) berpendapat bahwa: “Perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan

dimasa depan di dalam dan oleh suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Sedangkan Tjokroamidjojo (1998 : 12) berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Beliau juga mengatakan bahwa perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.

b. Jenis- jenis perencanaan

Kunarjo (2002:19) menjelaskan perencanaan dapat di susun berdasarkan empat criteria, antara lain:

1) Dilihat dari Jangka Waktu

➤ Perencanaan Jangka Panjang (sekitar 10 - 25 tahun)

Beberapa program atau proyek mempunyai jangka waktu penyelesaian yang singkat, tetapi juga ada yang lebih dari 10 tahun, misalnya program keluarga berencana, proyek jalan raya, program penanggulangan kemiskinan, dan lain sebagainya. Program dan proyek-proyek semacam itu tidak dapat diputus-putus dengan kebijakan-kebijakan baru, tetapi harus sambung menyambung.

➤ Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah biasanya dikaitkan dengan kebutuhan secara politis yang didasarkan karena jangka waktu yang disesuaikan dengan jabatan para penguasa pemerintahan. Biasanya jangka waktu 5 tahun adalah jangka waktu yang ideal mengingat presiden dan kabinetnya akan memerintah paling sedikit 5 tahun. Perencanaan jangka menengah mempunyai kurun waktu 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah ini, walaupun sasarannya bersifat umum, tetapi secara kasar telah dapat dilihat arah sasaran sector dan subsektornya.

➤ Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek atau dapat juga disebut Perencanaan Operasional Tahunan ini biasanya mempunyai kurun waktu 1 tahun. Karena jangka waktunya yang pendek maka sasaran-sasarannya dapat disajikan secara lebih konkret, misalnya : berapa hektar sawah yang harus diairi dan dimana lokasinya, berapa kilometer jalan yang harus dibangun dan dimana *trace*-nya, dan seterusnya. Dilihat dari sudut penyimpangan antara rencana dan sasaran yang akan dicapai,

perencanaan jangka pendek mempunyai penyimpangan yang lebih kecil dibanding dengan perencanaan jangka menengah dan panjang.

2) Dilihat dari Ruang Lingkup

➤ Perencanaan Agregatif atau Komprehensif

Perencanaan agregatif atau komprehensif meliputi perencanaan seluruh perekonomian secara global. Perencanaan ini dimulai dengan proyeksi peningkatan pendapatan atau produksi nasional dalam periode tertentu. Perencanaan ini mengikutsertakan model-model pertumbuhan yang memproyeksikan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi seperti pendapatan nasional, pengeluaran Pemerintah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, sasarannya meliputi sector pemerintah maupun sector swasta.

➤ Perencanaan Parsial

Perencanaan ini dimulai secara sepotong-potong melalui pembangunan program atau proyek-proyek yang biasanya untuk menanggulangi sasaran jangka pendek, misalnya untuk meningkatkan ekspor, menanggulangi kemiskinan, dan lain sebagainya. Investasi semacam ini kadang-kadang sulit dihubungkan dengan perencanaan secara keseluruhan, bahkan kadang-kadang tanpa didasari dengan perencanaan jangka panjangnya.

3) Dilihat dari Tingkat Keluwesan Perencanaan

➤ Perencanaan Preskriptif

Preskriptif adalah pengertian lain dari *prescription* atau resep. Pelaksanaan perencanaan ini dilakukan seolah-olah mengikuti apa yang ditulis dalam resep. Departemen teknis atau daerah harus mengikuti sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh pusat. Revisi dilaksanakan seminimal mungkin, karena dikhawatirkan akan mengubah rencana keseluruhan. Dengan menggunakan analisis *input-output*, maka sasaran dan variabel yang telah ditetapkan akan diikuti, kecuali apabila ada perubahan *technical coefficient* yang tidak dapat dielakkan. Apabila itu terjadi, maka akan berarti mengubah seluruh program yang terkait, karena program satu dan yang lainnya saling terkait, dan telah diperhitungkan sejak awal. Perencanaan seperti ini biasanya sangat kaku, sasarannya harus dapat dicapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Perencanaan preskriptif itu biasanya dilaksanakan oleh Negara yang menganut sistem sosialis totaliter.

➤ Perencanaan Indikatif

Perencanaan indikatif adalah perencanaan yang sasarannya merupakan indikasi dari apa yang diinginkan untuk dicapai. Walaupun tampaknya perencanaan indikatif ini cukup luwes tetapi tidak berarti penyimpangan-penyimpangan terhadap sasaran program dapat dilakukan secara bebas. Perencanaan ini mempunyai persyaratan seperti : (1) Mengarah pada tujuan; (2) Mempunyai urutan prioritas; dan (3) tidak didasari atas model yang kaku.

4) Dilihat dari Arus Informasi

Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat dibagi atas 2 kategori, yaitu: (1) Perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*); (2) Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*).

Yang disebut “atas” dan “bawah” adalah relative, misalnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau departemen teknis, di satu pihak, dan antara perencanaan makro dan perencanaan mikro di lain pihak. Perencanaan dari atas ke bawah ini mempunyai banyak kelemahan, antara lain menciptakan proyek-proyek yang tidak efisien. Perencanaan tingkat mikro, biasanya digunakan untuk menunjang pencapaian sasaran perencanaan makro. Oleh karena itu rencana pembiayaan untuk pelaksanaan tingkat mikro seharusnya konsisten dengan pembiayaan untuk pencapaian makronya. Apabila alokasi dari “atas” berlebihan dari seharusnya dibutuhkan, maka akan timbul penciptaan proyek yang tidak efisien, bahkan bukan tidak mungkin akan tercipta proyek yang menyimpang dari sasaran makronya. Sebaliknya perencanaan dari bawah ke atas juga mempunyai kelemahan, yaitu kemungkinan terjadinya sasaran program yang tidak konsisten atau seimbang sehingga tidak mencapai manfaat yang maksimal.

c. Tipologi Pendekatan Perencanaan

Amien (2005: 195) menjelaskan beberapa model pendekatan perencanaan yakni:

➤ Model rasional komprehensif

Model ini menganut doktrin determinisme dan reduksionisme. Pendekatan ini hanya sesuai untuk kondisi di mana sasaran pembangunan terdefinisi dengan baik, serta kondisi lingkungan strategis dapat diprediksi dengan benar. Misdalnya penggunaan model *input-output* dalam perencanaan. Ciri utama model ini adalah membagi masalah pembangunan ke dalam beberapa bidang. Bidang-bidang yang dimaksud selanjutnya dibagi lagi ke dalam sektor, sektor dibagi ke dalam subsektor dan seterusnya, sehingga diperoleh masalah pembangunan yang tersegmentasi dan terdefinisi dengan jelas. Kelemahan model ini pada umumnya terletak pada asumsinya yang tidak dinamis. Analisis didasarkan kepada data masa lalu, dan mengasumsikan bahwa data itu dapat digunakan untuk memproyeksikan masa depan. Sumber kelemahan lain dari model ini adalah asumsinya bahwa kondisi dan pengaruh lingkungan strategis dapat dikendalikan atau bahkan diabaikan. Asumsi ini berlaku hanya untuk wilayah perencanaan yang relatif kecil dan terisolasi.

➤ Model Partisipatif

Model ini menekankan perlunya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan, setidaknya berbasis pada tiga pertimbangan, yakni:

- 1) Mengumpulkan informasi, untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang diperlukan agar pembangunan memiliki kemungkinan yang semakin besar untuk berhasil dengan kata lain mengurangi ketidakpastian. Objek yang sama akan memberikan

persepsi yang berbeda apabila dilihat oleh dua atau lebih pengamat dengan cara pandang yang berbeda, walaupun dilakukan serentak. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi (kebenaran), diperlukan keterlibatan sebanyak mungkin pengamat.

- 2) Menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi masyarakat diperlukan bukan sekedar untuk memberikan “perasaan” kepada masyarakat bahwa keberadaan mereka diperhatikan, dengan demikian maka akan mau ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan sebagaimana yang dianut sekarang. Dengan kata lain penyaluran aspirasi diperlukan untuk mencegah terjadinya gangguan kecil dalam suatu system dalam tatanan yang nantinya akan menyebabkan rusaknya system secara keseluruhan.
- 3) Diversivitas proses pengambilan keputusan. Diversivitas akan memperkuat tatanan secara keseluruhan, karena gejolak-gejolak dapat dilokalisasi pada bagian-bagian tatanan, sehingga tatanan secara keseluruhan akan tetap stabil.

➤ Model Adaptif

Perencanaan adaptif mengitegrasikan keluwesan (fleksibilitas) dan kemampuan responsive (*responsiveness*) pada level perencanaan dan pengambilan keputusan. Adaptasi hanya pada level manajemen tidak mencukupi untuk menghadapi atau mengatasi kompleksitas masalah yang dihadapi, karena manajemen lebih sering diasosiasikan dengan implementasi ketimbang perencanaan. Model ini senantiasa melakukan modifikasi terhadap rencana pembangunannya agar senantiasa sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

d. Fungsi Perencanaan

Afifuddin (2012: 94) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan system dalam melaksanakan dan mengevaluasi setiap kegiatan karena pada dasarnya perencanaan mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional, rencana merupakan alat efisiensi dan efektivitas untuk menghindari pemborosan berkat keterarahan kegiatan untuk mencapai tujuan;
- 2) Dengan rencana yang matang, dilakukan perkiraan keadaan mengenai hal-hal dan prospek perkembangan masa depan yang pada gilirannya dapat mengurangi ketidakpastian yang akan dihadapi;
- 3) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternative tentang cara yang diduga merupakan cara terbaik,

setelah melalui pengkajian mendalam, dapat member petunjuk tentang ciri-ciri setiap alternative yang ada, baik sifatnya positif maupun negative;

- 4) Dengan adanya rencana, tergambar pula jenis dan bentuk satuan-satuan kerja penyelenggara semua kegiatan yang sifatnya berlanjut dan oleh karenanya melembaga;
- 5) Dengan rencana; dapat ditetapkan standar prestasi yang baku yang antara lain berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan usaha;
- 6) Rencana dapat dijadikan sebagai dasar utama untuk penjabaran program kerja secara sistematis;
- 7) Dengan adanya rencana, jumlah, jenis keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang diperlukan dapat ditetapkan dengan lebih akurat;
- 8) Rencana menjadi dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan bahkan juga, penilaian;
- 9) Implikasi pembiayaan pun dapat terlihat dengan jelas dalam suatu rencana;
- 10) Dengan rencana yang jelas, sarana dan prasarana kerja yang mutlak diperlukan dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

e. Proses Perencanaan

Dalam Afifuddin (2012:192), proses dari perencanaan meliputi:

- 1) Menentukan atau menetapkan dengan jelas maksud dan tujuan.
- 2) Menentukan alternative.
- 3) Mengatur sumber-sumber yang diperlukan.
- 4) Menentukan organisasi, metode dan prosedur.
- 5) Menentukan atau menetapkan rencana itu sendiri.

6. Konsep Pembangunan

Berbagai pengertian tentang pembangunan telah dikemukakan oleh pakar ekonomi, politik maupun pakar social. Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan tidak sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan social budaya.

Siagian (1998:75) dalam Admisitrasi Pembangunan mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,

Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*).

Pendapat yang dikemukakan oleh Ndraha (1990: 15-16) mengatakan bahwa pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama dari definisi tersebut.

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupu kelompok (*capacity*).
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).
- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
- d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
- e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).

Afifuddin (2012 : 42) mengemukakan hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik. Untuk melakukan pembangunan yang lebih efektif masyarakat perlu mempelajari sejarah bangsa-bangsa.

Afifuddin (2012:59) juga menjelaskan dalam konteks yang luas, pembangunan mempunyai beberapa pengertian, yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda pula. Beberapa pengertian tersebut ialah:

- a. Pembangunan adalah Perubahan

Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik

dalam arti peningkatan taraf hidup saja, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang lainnya. Karena dapat dipastikan bahwa satu segi kehidupan bertalian erat dengan segi-segi kehidupan yang lainnya. Manusia bukan hanya makhluk ekonomi, akan tetapi juga makhluk social dan makhluk politik.

b. Pembangunan adalah Pertumbuhan

Yang dimaksud pertumbuhan ialah kemampuan suatu Negara untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan. Sebagai wujud implementasinya, tidak ada satu segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan. Adalah hal yang tepat dan wajar apabila ide pertumbuhan mendapat penekanan dan sorotan dalam pembangunan, karena secara filsafat dapat dikatakan bahwa suatu organisme – suatu Negara dapat dikatakan sebagai suatu organisme (Pamudji, S, 1989:9) – yang berhenti bertumbuh sesungguhnya sudah mulai dengan awal dari akhir kehidupan. Karena suatu Negara dipandang sebagai suatu organisme, maka logis pulalah pertumbuhan itu diperlukan sebagai bagian yang mutlak dari pengertian pembangunan.

c. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan.

Keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Berarti bahwa baik secara konseptual maupun secara operasional, tujuan dan bergabagai kegiatan dengan sengaja ditentukan dalam seluruh potensi serta kekuatan nasional. Satu kondisi ideal – yang merupakan salah satu sasaran pembangunan – ialah apabila kesadaran itu terdapat dalam diri seluruh warga masyarakat pada semua lapisan dalam tingkatan dan tidak terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

d. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi.

Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apa pun tujuannya, apa pun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil. Negara merupakan organisasi, sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pimpinannya mau tidak mau pasti terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan.

e. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan Negara atau bangsa.

Pada umumnya, komponen-komponen dari cita-cita akhir dari Negara-negara modern di dunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya bersifat relative dan sukar membayangkan tercapainya “titik jenuh yang absolute”, yang setelah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti:

- 1) Keadilan social,
- 2) Kemakmuran yang merata,
- 3) Perlakuan sama di mata hukum,
- 4) Kesejahteraan material, mental dan spiritual,
- 5) Kebahagiaan untuk semua,
- 6) Ketenteraman,dan
- 7) Keamanan.

7. Konsep Perencanaan Pembangunan

Pola perencanaan pembangunan yang selama ini dilakukan berbagai Negara berkembang yang lebih dikenal dengan *top-down strategy* sebagaimana dikemukakan oleh Ndraha (1990:127) pada awal proses pembangunan memang pola ini membawa manfaat, tetapi takkala pola itu mengacu pada system, timbullah masalah. Masyarakat terbiasa untuk bergantung pada pemerintah dan kemampuannya untuk berkembang secara mandiri sukar dikembangkan. Mekanisme *bottom-up strategy* memiliki beberapa keunggulan yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Ndraha (1990:129)

- a. Melalui mekanisme bawah ke atas, masyarakat dapat member tanggapan, jawaban atau *feedback* kenapa pemerintah tentang kesesuaian antara aspirasi masyarakat dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah.
- b. Melalui mekanisme tersebut masyarakat dapat mengemukakan dan menyalurkan aspirasi, permintaan dan tuntutannya kepada pemerintah.
- c. Melalui mekanisme tersebut dapat terjadi tawar menawar, pemufakatan atau kompromi antara masyarakat dengan pemerintah.
- d. Dapat dilakukan konsumsi timbal-balik antara informasi yang dapat mengenai berbagai hal
- e. Dapat terjadi proses "*exchange*" antara masyarakat dengan pemerintah atau kandidat politik misalnya bagi kaum miskin untuk memberikan suaranya dengan harapan akan menerima keuntungan tertentu dari pemerintah.

Tetapi mekanisme *bottom up* saja tidak cukup untuk membantu tercapainya efektivitas perencanaan pembangunan, karena dalam pengambilan keputusan, sering kali masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar, karena dominasi pemerintah yang begitu kuat. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat turut mengambil keputusan atas hal-hal yang menyangkut perbaikan taraf hidup anggota-anggotanya, maka lembaga-lembaga yang berpartisipasi dalam program pemerintah harus memiliki

kekuasaan yang nyata, artinya lembaga-lembaga tersebut memiliki keberdayaan.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (aktor), baik pemerintah swasta, maupun sekelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek-aspek fisik, social ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara:

- a. Terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Merumuskan tujuan kebijakan pembangunan
- c. Menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah (solusi).

Melaksanakan dengan sumber daya yang tersedia, sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditangkap secara berkelanjutan (sahroni, 2000:34).

8. Konsep Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam proses perencanaan pembangunan haruslah dimulai dengan upaya menjadikan masyarakat sebagai pihak yang harus memulai mengartikulasi kebutuhana mereka dengan segala prioritas yang ditentukan sendiri, dalam wujud peran dan fungsinya, turut menyampaikan pendapat, mengidentifikasi dan menemukan alternative pemecahan masalah-masalah pembangunan, termasuk didalamnya mebangun bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan untuk lebih mengespresikan kepentingan dan aspirasi komunitasnya, sehingga apa yang terjadi rencana pemerintah akan berhasil secara efektif, dalam arti mencapai tujuan yang direncanakan serta mendorong

mereka untuk memberikan kontribusi dan berbagai tanggung jawab untuk mencapai tujuan itu.

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Desa/Kelurahan

Mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan diawali dengan tahap persiapan berupa rembuk/musyawarah di tingkat dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti misalnya kelompok masyarakat) yang merupakan *stakeholders* di wilayah dusun/RW tersebut, membahas mengenai masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat setempat yang merupakan rencana kebutuhan pembangunan hasil rembuk kelompok-kelompok masyarakat dimaksud, selanjutnya diajukan dan dijadikan sebagai salah satu bahan masukan (input) dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbang desa/kelurahan).

Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan oleh Tim Penyelenggaraan Musrenbang desa/kelurahan yang telah dibentuk atau ditetapkan sebelumnya oleh kepala desa/lurah, dan pesertanya terdiri dari komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti : Ketua RT/RW, kepala dusun/lingkungan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua adat, organisasi masyarakat, komite sekolah, kelompok tani/nelayan dan lain-lain. Wakil-wakil dari peserta tersebut yang memaparkan masalah utama

yang dihadapi serta merumuskannya untuk dijadikan sebagai prioritas rencana kegiatan pembangunan di desa/kelurahan yang bersangkutan.

Dalam musrenbang tersebut, kepala desa/lurah serta ketua dan anggota BPD bertindak sebagai narasumber yang menjelaskan tentang prioritas kegiatan/program yang tercantum dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) desa/kelurahan.

Keluaran yang dihasilkan pada Musrenbang desa/kelurahan adalah:

- 1) Dokumen rencana kerja pembangunan desa/kelurahan yang berisi:
 - a) Prioritas rencana kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang didanai oleh alokasi dana desa dan atau swadaya.
 - b) Prioritas rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui dinas/instansi tingkat kabupaten atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk selanjutnya dibahas dalam forum musrenbang kecamatan.
- 2) Daftar nama delegasi desa yang telah dirumuskan oleh peserta musrenbang desa/kelurahan, untuk mengikuti musrenbang kecamatan.

Narasumber dalam musrenbang terdiri dari camat dan aparat kecamatan lainnya dari kecamatan, serta Bappeda, perwakilan SKPD Kabupaten/kota dan anggota DPRD dari wilayah pemilihan bersangkutan.

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah:

- a) Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi SKPD yang siap dibahas dalam forum Satuan

Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten/Kota, yang akan didanai oleh APBD Kabupaten/kota dan sumber pendanaan lainnya,

- b) Terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti forum satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota.

b. Tingkat Kabupaten

Mekanisme perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten didahului dengan kegiatan pada Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD), kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota (Musrenbang Kabupaten/Kota) untuk menetapkan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu berdasarkan fungsi SKPD maupun yang dipilih berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, dana sumber pendanaan lainnya, serta rancangan pendanaan untuk alokasi dana desa.

9. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Lurah Tahap persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menetapkan Tim penyelenggara musrenbang
- b. Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Mengkomplikasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggungjawab SKPD dari masing-masing kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
 - 2) Menyusun jadwal dan agenda musrenbang desa.

- 3) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan musrenbang desa minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
- 4) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta musrenbang desa, baik dari kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
- 5) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi sert notulen untuk musrenbang desa.

Tahap pelaksanaan dengan agenda sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran peserta musrenbang desa.
- 2) Pemaparan kepala desa mengenai prioritas masalah desa, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran.
- 3) Pamarapan mengenai rencana kerja SKPD ditingkat desa yang bersangkutan beserta strategi, besaran plafon dana oleh kepala-kepala Cabang SKPD.
- 4) Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masing-masing kelurahan menurut fungsi/SKPD oleh tim penyelenggara musrenbang desa.
- 5) Verifikasi oleh delegasi kelurahan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan oleh kelurahannya sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.

- 6) Pembagian peserta musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.
- 7) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan desa yang dianggap perlu oleh peserta musrenbang namun belum diusulkan oleh kelurahan (kegiatan lintas kelurahan yang belum diusulkan kelurahan).
- 8) Kesepakatan criteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.
- 9) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan desa berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
- 10) Pemaparan prioritas pembangunan desa dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta musrenbang desa.
- 11) Penetapan daftar nama delegasi desa 3-5 orang (masyarakat) untuk mengikuti Forum SPKD dan Musrenbang kabupaten/kota. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

Keluaran yang dihasilkan Musrenbang tingkat Kecamatan:

- 1) Daftar prioritas kegiatan pembangunan diwilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD atau gabungan SKPD, yang siap dibahas pada forum satuan kerja perangkat daerah dan musrenbang kabupaten/kota, yang akan didanai melalui APBD dan sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya, daftar tersebut disampaikan

kepada masyarakat di masing-masing kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti musrenbang desa.

- 2) Terpilihnya delegasi desa untuk Forum satuan kerja perangkat daerah dan musrenbang kecamatan.
- 3) Berita acara musrenbang tahunan desa.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Sutarto, Soediyono dan A.D. Suharsono (1991), dalam Penelitiannya yang berjudul Organisasi Program Pembangunan Berkelanjutan dengan mengambil kasus proyek dalam Program Pengembangan Wilayah (PPW) di sebuah Kabupaten di Jawa Tengah yaitu program pemberian bantuan temak dengan sistem bergulir. Hasil penelitian mengindikasikan sudah adanya kecenderungan pengelolaan program yang bersifat *Bottom Up Planning*. Hal tersebut ditunjukkan dengan diberikannya peluang kepada masyarakat miskin untuk memilih sendiri anggota masyarakat calon penerima gaduh temak berikutnya berdasarkan kriteria Miskin, Potensial dan Produktif (MPP).

Kelonggaran ini juga didukung dan atau tidak mendapat campur tangan yang ketat dari pemerintah lokal, dalam hal ini aparat pemerintah kecamatan hanya sebagai fasilitator. Namun demikian di sisi yang lain penelitian ini juga menyimpulkan masih adanya pengendalian yang kaku dengan menggunakan sistem komando (alur hirarki) terutama dari aparat pemerintah kabupaten (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) terhadap aparat kecamatan. Dalam kasus ini. aparat kecamatan tidak boleh

mengubah jenis program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.

2. Iskandar Mirsa (1998), dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan suatu studi di Desa Cibeusi dan Desa Sayang Kecamatan Cikeruh Kabupaten Sumedang, menyimpulkan bahwa dalam teori pembangunan yang berpusat pada masyarakat tampaknya masih belum optimal, hal tersebut diindikasikan oleh kenyataan bahwa program yang sudah dilaksanakan sejak 1992/1993 ternyata sampai dengan tahun 1996/1997 belum terlaksana dengan sepenuhnya. Penyusunan program pembangunan masih lebih banyak berasal dari atas dan bukan dari masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Dalam kaitannya dengan program pembangunan desa, ditemukan banyak proyek sektoral yang tidak berfungsi dengan baik, hal ini karena tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat desa tersebut.

3. Nandang Suherman (2000), mempublikasikan pengalamannya dalam mengimplementasikan hasil penelitian jurusan Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) yang berjudul Pengembangan Partisipatif di Jatinangor. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa proses penguatan dan pengorganisasian masyarakat dalam konteks perencanaan partisipatif di Jatinangor telah menghasilkan beberapa manfaat, antara lain ; (a) Timbulnya kesadaran baru di kalangan tokoh dan aktivis kemasyarakatan tentang perlunya mengorganisir diri guna meningkatkan nilai tawar dalam proses penentuan kebijakan pembangunan (b) Terjadinya peningkatan

kapasitas warga masyarakat dalam merumuskan dan memecahkan masalah serta mengadvokasikannya kepada pihak yang terkait; (c) Terbangunnya suasana dialogis antara birokrasi dan masyarakat dalam mencari solusi pemecahan permasalahan pembangunan; (d) Mulai bergesernya paradigma pemerintahan di lingkungan birokrasi yaitu dari mental minta dilayani menjadi mental melayani.

4. Khoirun (2003), dalam penelitiannya yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, suatu studi kasus Program Pelaksanaan Partisipasi di Kecamatan Belongbendo Kabupaten Sidoarjo. Menyimpulkan bahwa program bantuan pembangunan partisipatif dapat memacu partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan di desa/kelurahan, sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. .
5. Slamet (1994), dengan penelitiannya yang berjudul Partisipasi di Dalam Lembaga Sosial Desa (LSD) di enam desa di Kabupaten Boyolali menyimpulkan bahwa peran Kepala Desa sangat dominan dalam pembangunan sehingga setiap keputusan atau kebijakan diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan sangat kurang atau dapat dikatakan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi secara langsung. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan/keahlian masyarakat, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya.

Dari kelima hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa perencanaan partisipatif dalam pembangunan yang pelaksanaannya didahului

dengan proses pembelajaran bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam suatu hubungan yang saling mengisi dan melengkapi, hasilnya lebih sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan apabila perencanaan partisipatif dilakukan hanya dengan maksud untuk memenuhi persyaratan formal saja, maka hasil yang diperoleh sama sekali jauh dari yang diharapkan bahkan kemungkinan besar akan mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, perencanaan partisipatif dalam pembangunan harus dilihat sebagai kebutuhan bersama bagi masyarakat dan pemerintah daerah, bukan sekedar sebuah kewajiban formal.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagaimana tersebut di atas adalah dalam fokus penelitiannya yaitu, fokus penelitian terdahulu (diatas) adalah tentang pelaksanaan program, kelembagaan/organisasi dalam perencanaan pembangunan serta peranannya, dampak suatu program, partisipasi masyarakat dalam suatu program dan manfaat atau dampak dari perencanaan partisipatif. Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah proses perencanaan partisipatif dan kendala-kendala dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

C. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada Perencanaan Partisipasi Dalam Proses Pembangunan di Desa Patongloan, dengan menggunakan beberapa pertimbangan dalam perencanaan berbasis partisipatif, yang tersiri atas:

1. Mengumpulkan informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi dari masyarakat tentang permasalahan yang terjadi diwilayah tersebut yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Untuk mengumpulkan sebanyak

mungkin informasi, yang diperlukan ialah menghadirkan sebanyak mungkin anggota masyarakat ataupun perwakilan dari masyarakat agar pembangunan memiliki kemungkinan yang semakin besar untuk berhasil dengan kata lain mengurangi ketidakpastian.

2. Menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan oleh pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan, mereka menyalurkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan musrenbang untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Penyaluran aspirasi masyarakat diperlukan bukan sekedar untuk memberikan “perasaan” kepada masyarakat bahwa keberadaan mereka diperhatikan, dengan demikian maka akan mau ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan sebagaimana yang dianut sekarang.
3. Diversivitas proses pengambilan keputusan. Keputusan pemerintah dalam perencanaan pembangunan memiliki perbedaan di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Namun perbedaan tersebut akan membuat pembangunan di suatu daerah tidak merata karena akan ada wilayah yang merasa tidak diuntungkan oleh keputusan tersebut.

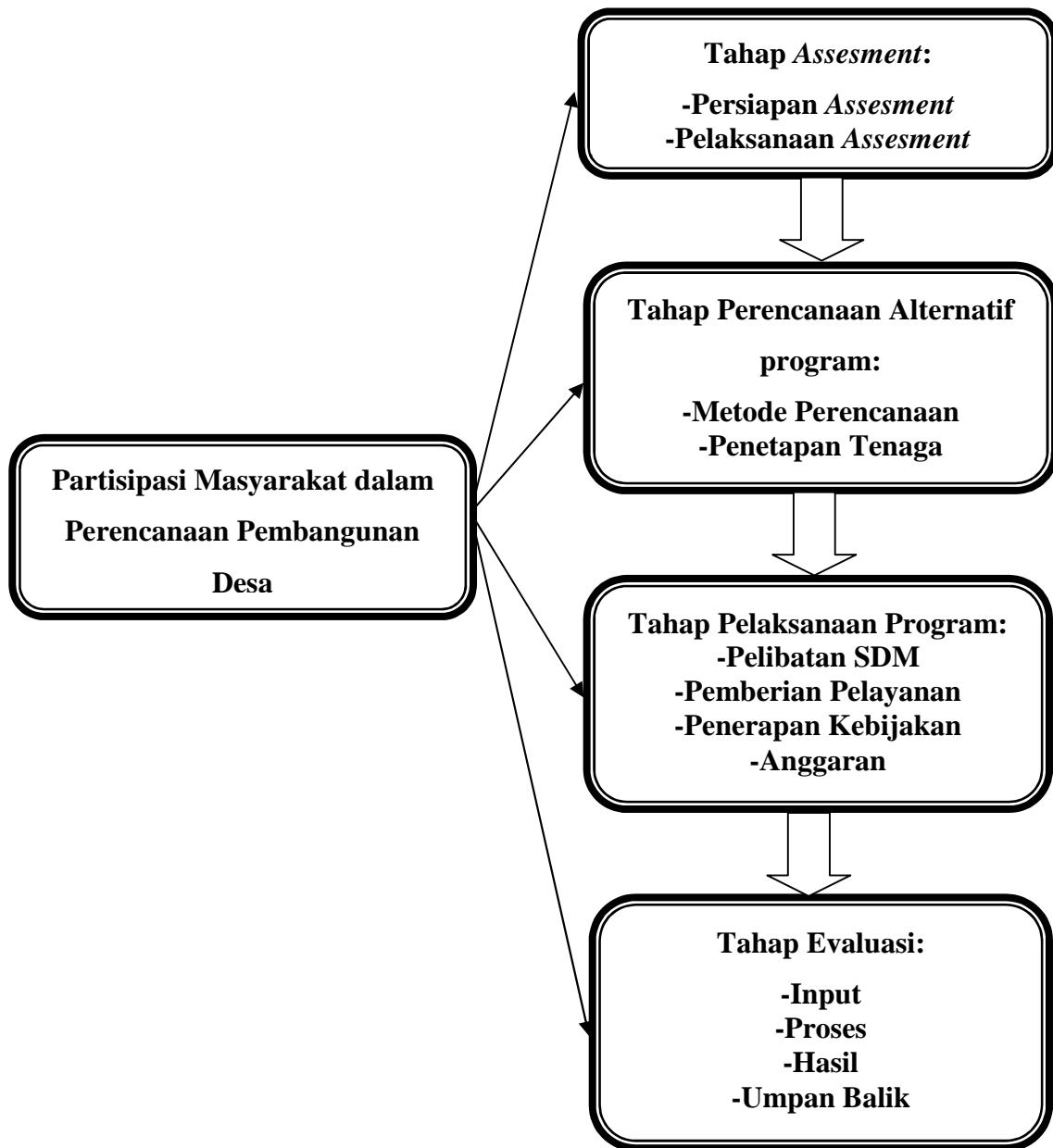
Apabila pada proses perencanaan terutama pada proses pelaksanaan musrenbang telah memenuhi ketiga aspek tersebut, berarti pemerintah telah melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah dengan model *bottom up*. Sebaliknya apabila dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah tidak memenuhi tiga aspek dalam pendekatan perencanaan yang berbasis partisipasi tersebut diatas maka pemerintah tidak melaksanakan proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan harapan

dan keinginan masyarakat dan masyarakat hanya dijadikan sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan serta lembaga perencanaan pembangunan hanya melaksanakan proses seremonial perencanaan pembangunan tanpa melihat substansi perencanaan pembangunan itu sendiri.

D. Kerangka Konsep

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melihat gambaran mengenai perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif yang digunakan menurut Abe (2005:88) yaitu perencanaan berbasis partisipasi yang terdapat dalam konsep tipologi perencanaan pembangunan. Adapun beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam melihat bagaimana perencanaan berbasis partisipatif yaitu pengumpulan informasi sebanyak mungkin, penyaluran aspirasi masyarakat, dan diversivitas pengambilan keputusan. Dengan perencanaan yang partisipatif, diharapkan strategi maupun kebijakan pembangunan nasional lebih memihak kepada masyarakat di daerah maupun di pusat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan beberapa konsep dan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka berikut adalah gambaran kerangka penelitian dari penelitian ini:



Gambar: 1 Kerangka Konsep

E. Pertanyaan Penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, peneliti mendiskripsikan secara terperinci dan mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa tinjauan dari tahap *assesment*?
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa tinjauan dari tahap perencanaan alternatif program?
3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa tinjauan dari tahap pelaksanaan program?
4. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa tinjauan dari tahap evaluasi?

Tabel 1.
Tahapan partisipasi dalam pembangunan

TAHAP ASSESSMENT	
1.	Persiapan
2.	Penentuan rencana pembangunan
3.	Rapat penentuan pembangunan
4.	Sosialisasi perencanaan pembangunan
TAHAP PERENCANAAN ALTERNATIF PROGRAM	
1.	Pengerasan jalan
2.	Rabat Beton
3.	Pembangunan Posyandu
4.	Pembangunan Aula Kantor Desa
5.	Perintisan jalan

TAHAP PELAKSANAAN	
1.	Pengerasan jalan Rante Baba – Lemek 350 m
2.	Rabat Beton jalan Baroko – Tangsa 3.000 m
3.	Pembangunan Jembatan Korang 2 Unit
4.	Pembangunan Posyandu Rante Baba
5.	Pembangunan Aula Kantor Desa
6.	Perintisan jalan poros Buntu Pare – Benteng Alla
7.	Pembangunan pagar Pustu
TAHAP EVALUASI	
1.	Pemeliharaan jalan Rante Baba
2.	Pemanfaatan jalan Baroko
3.	Pemeliharaan sanitasi lingkungan

BAB III

DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain. Selain itu penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Pemilihan lokasi penelitian di partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Patongloan ini karena dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di kecamatan ini menurut peneliti terdapat beberapa hal yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pembangunan yang dilakukan kurang maksimal dan belum memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat sebenarnya apakah perencanaan pembangunan tersebut telah berbasis partisipasi masyarakat.

C. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah informan, dokumen, serta tempat dan peristiwa. Infoman yaitu orang-orang yang nantinya

secara aktif memberikan informasi, tentang situasi dan kondisi latar belakang serta permasalahan penelitian. Penentuan informan ini awalnya dipilih secara sengaja (*purposive*) yaitu dipilih orang-orang yang dianggap tahu tentang permasalahan penelitian ini , selanjutnya secara *Snow Ball* sampai mencapai tingkat *saturated* (tingkat kejenuhan/tidak ditemukan lagi informasi yang berbeda). Setelah memasuki lapangan penelitian, peneliti menghubungi informan tertentu untuk meminta keterangan padanya, kemudian akan terus berkembang ke informan yang lainnya yang terkait dengan fokus penelitian sampai diperoleh data dan informasi yang lengkap dan menunjukkan tingkat kejenuhan informasi.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain:

- | | |
|---|-----------|
| 1) Kepala Desa | : 1 orang |
| 2) Tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda) | : 3 orang |
| 3) <u>Masyarakat umum</u> | : 3 orang |
| Jumlah informan | : 7 orang |

Penelitian ini juga menggunakan data pendukung yang bersumber dari dokumen, sebagai sumber data, sifatnya hanya melengkapi data utama, yaitu Dokumen, catatan, laporan serta arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian yang terdapat di Bappeda dan instansi lain yang terkait. Sumber data ini terdiri dari : dokumen perencanaan pembangunan daerah, APBD, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), notulen musyawarah perencanaan pembangunan desa, musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten.

Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu di Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, lokasi tempat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui Tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yaitu Kepala Seksi Pembangunan Desa Patongloan, Kepala Desa Patolongan dan beberapa tokoh masyarakat pada Desa Patongloan, Kecamatan Baroko yang dianggap mengetahui banyak tentang kondisi objektif dari proses penyusunan perencanaan pembangunan.

b. Observasi

Observasi yaitu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan atau data yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, peneliti memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Baroko melalui berbagai kondisi dan situasi nyata yang terjadi baik secara formal maupun non formal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian ini serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku-buku, literature, laporan tahunan mengenai dokumen rencana kerja pembangunan, dokumen rumusan hasil musrenbang, dan dokumen peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif pedoman wawancara, observasi, dan telaah dokumen merupakan hal yang dijadikan kesimpulan dalam hasil penelitian. Moleong (2011: 169) memaparkan bahwa “ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup segi responsive, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan dan memanfaatkan kesempatan mencari respons yang tak lazim atau *idiosinkratik*”.

Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat fotografi, tape recorder, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian, alat bantu lainnya.

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

- a. 1. Identitas tempat : Desa Patongloan
2. Alamat : Rante Baba, Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kab. Enrekang
3. Waktu pengambilan dokumen: 04 Oktober s/d 02 November 2017
- b. Struktur organisasi Desa Patongloan
- c. Dokumen yang berhubungan dengan strategi perencanaan pembangunan desa:
 1. Dokumen/ arsip yang berhubungan dengan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Patongloan
 2. Dokumen/foto-foto pelaksanaan musyawarah dan pelaksanaan pembangunan di Desa Patongloan

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulakna oleh penulis, dianalisis secara kuantitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

Untuk menganalisa berbagai fenomena dilapan dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.

2. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

3. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. *Display* data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validasinya.

F. Keabsahan Data

Setiap penelitian memerlukan adanya standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitian tersebut. Di dalam penelitian kualitatif standar standar tersebut dinamakan keabsahan data. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada empat kriteria (Moleong, 2005:182), yaitu sebagai berikut:

1. Kepercayaan (*credibility*)

Menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif yang berfungsi : *pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. *Kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Untuk memeriksa kredibilitas data dilakukan kegiatan sebagai berikut ;

- a) Perpanjangan waktu di lapangan, hal ini dilakukan sampai data yang diperoleh benar-benar telah mengalami tingkat saturated/kejenuhan.
- b) Ketekunan/kecennatan pengamatan; dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci dan cermat.
- c) Triangulasi, pemeriksaan keabsahan data dengan jalan melakukan crosscheck data dengan jalan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain dan sering menggunakan metode yang berlainan.

- d) Peer debriefing hasil penelitian didiskusikan dengan teman sejawat/kolega atau dengan orang yang mempunyai pengetahuan tentang pokok penelitian dan metode penelitian yang dilakukan.
- e) Kajian kasus negatif, melakukan penelitian lagi ke lapangan dengan kajian negatif atau kebalikan berlawanan dengan penelitian sebelumnya.
- f) Pengecekan anggota; pemeriksaan keabsahan data oleh anggota penelitian yang lain, hal ini dilakukan apabila penelitian dilakukan oleh suatu kelompok.

2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris tergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan peralihan tersebut, maka peneliti harus berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Hasil penelitian dapat berlaku di tempat lain dengan kondisi dan karakteristik yang relatif sama.

3. Ketergantungan (*Dependendability*)

Dilakukan dengan cara audit kebergantungan yaitu pengecekan kebergantungan antara konsep-konsep, data-data, serta komponen dan proses penelitian. Dalam hal ini diperlukan pertimbangan keilmuan dari komisi pembimbing. Dalam hal ini dapat juga dilakukan "audit trail" (memeriksa dan melacak suatu kebenaran).

4. Kepastian (*Confirmability*)

Yaitu melakukan audit kepastian. Kriteria kepastian berasal dari konsep "obyektivitas" menurut peneliti. Sesuatu itu obyektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang. Penulis melakukan ini dengan meminta bantuan beberapa ternan untuk melakukan uji kepastian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Lokus/Objek Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Patongloan adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Baroko dan berada di bagian utara Kabupaten Enrekang. Jarak tempuh wilayah Desa Patongloan dari Ibukota Kabupaten Enrekang 48 Km. Desa ini memiliki luas wilayah 6,0 Km², dengan potensi lahan yang produktif diantaranya lahan perkebunan, lahan pertanian dan hutan.

Letak geografis Desa Patongloan berada di wilayah barat Kabupaten Enrekang. Adapun batas wilayah Desa Patongloan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Benteng Alla Utara.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Benteng Alla.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Benteng Alla Utara.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Benteng Alla, dan Garassik Tator.

Gambar 2 : Peta Desa Patongloan



Sumber : Profil Desa Patongloan

Secara geografis Desa Patongloan memiliki kondisi daerah yang berbukit-bukit, berada diatas gunung dengan ketinggian 500 m sampai 1000 m diatas permukaan laut. Kondisi tanah cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman, baik tanaman jangka pendek maupun jangka panjang. Desa Patongloan sendiri memiliki iklim tropis yaitu musim kemarau dan musim hujan.

2. Keadaan Demografis

Desa Patongloan memiliki luas wilayah 6,0 Km². Kepadatan penduduk sudah mencapai 1.261 jiwa penduduk tetap dengan jumlah kepala keluarga 327, penduduk laki-laki sebanyak 621 jiwa dari seluruh jumlah penduduk sementara penduduk perempuan sebanyak 640 dari seluruh jumlah penduduk.. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini.

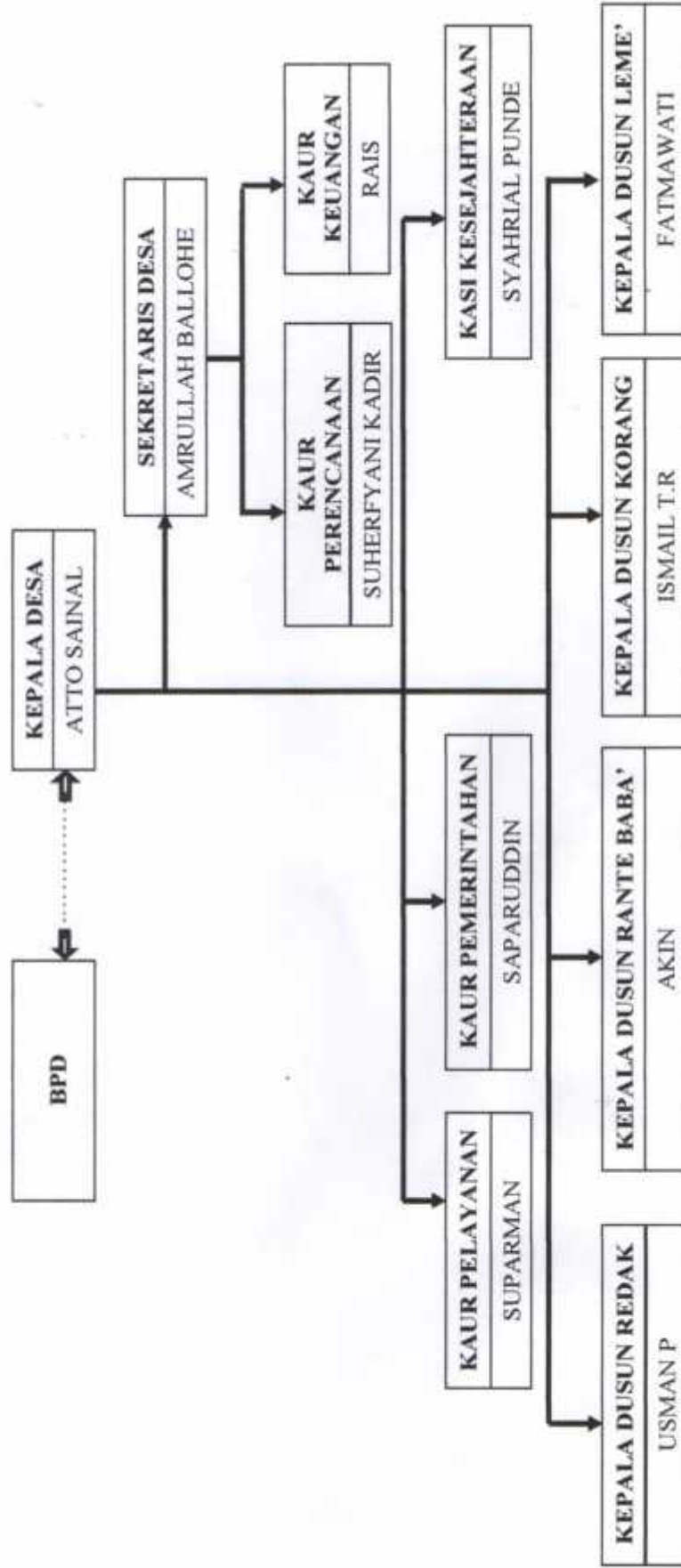
Masyarakat Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 95% beragama Islam, dan 5% beragama Kristen. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani.

3. Struktur Organisasi Desa Patongloan

Gambar 3

Struktur Organisasi Desa Patongloan

Sumber : Profil Desa Patongloan dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa



B. Karakteristik Sumber Data

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Patongloan pada tahun 2017 sebanyak 1.261 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 327, penduduk laki-laki sebanyak 621 jiwa atau 49% dari seluruh jumlah penduduk sementara penduduk perempuan sebanyak 640 atau 51% dari seluruh jumlah penduduk.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Patongloan

No	Kategori Penduduk	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	621	49%
2.	Perempuan	640	51%
Total		1.261	100%

Sumber: Profil Desa Patongloan 2017

2. Usia

Struktur umur penduduk penting untuk diketahui karena struktur umur penduduk dapat memberikan petunjuk penting dalam pelaksanaan pembangunan misalnya dengan mengetahui struktur umur, kita dapat mengetahui penduduk usia sekolah dan jumlah tenaga kerja. Struktur umur penduduk Desa Patongloan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3
Kelompok Usia Desa Patongloan

No	Kelompok Usia	Jumlah Jiwa	Persentase
1.	Usia Balita	180	14,3%
2.	Usia Sekolah	445	35,3%
3.	Usia Kerja	373	29,6%
4.	Usia Lanjut	263	20,8%
Total		1.261	100%

Sumber: Profil Desa Patongloan 2017

Tabel diatas memberikan gambaran mengenai keadaan serta perkembangan penduduk di Desa yang bersangkutan, nampak bahwa usia sekolah merupakan kelompok usia terbanyak dibanding kelompok usia lainnya yaitu 445 atau 35,3 persen sedangkan kelompok usia paling sedikit adalah usia balita yaitu 180 atau 14,3%.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam perekonomian dan pembangunan disuatu daerah dan sekaligus dapat menunjang kesejahteraan masyarakat desa, bahwa sangat penting dalam memberantas kemiskinan. Pendidikan berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), semakin tinggi tingkat kualitas SDMnya, suatu daerah cenderung akan memiliki tingkat kemajuan pembangunan yang lebih tinggi. Sebaran penduduk Desa Patongloan menurut tingkat pendidikan disajikan berikut:

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Desa Patongloan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1.	Buta Aksara	257	20,4%
2.	Tidak Tamat SD	153	12,1%
3.	Tamat SD	315	25,0%
4.	Tamat SMP	168	13,3%
5.	Tamat SMA	210	16,7%
6.	D-3	34	2,7%
7.	S-1	124	9,8%
Total		1.261	100%

Sumber: Profil Desa Patongloan 2017

Berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Patongloan relatif bervariasi, buta aksara sebanyak 257 orang atau 20,4%, tidak tamat SD sebanyak 153 orang atau 12,1%, tamat SD sebanyak 315 orang atau 25 persen, tamat SMP sebanyak 168 orang atau 13,3%, tamat SMA sebanyak 210 orang atau 16,7%, jenjang pendidikan D-3 sebanyak 34 orang atau 2,7% dan masyarakat yang berpendidikan Sarjana sebanyak 124 orang atau 9,8 persen saja. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Patongloan masih rendah.

Masih relatif rendahnya tingkat pendidikan formal penduduk pada lokasi penelitian, juga ditunjukkan tidak adanya masyarakat yang pernah mengikuti pendidikan non formal seperti kursus atau pelatihan. Hal

tersebut disebabkan sibuknya masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga tidak ada waktu untuk meningkatkan keterampilan melalui kursus-kursus, demikian juga tidak pernah ada program pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

4. Pekerjaan

Penduduk desa Patongloan mempunyai mata pencaharian yang beragam. Sebagian besar sumber mata pencaharian desa Patongloan adalah sektor dari Petani. Petani merupakan sumber mata pencaharian yang utama di desa Patongloan, penduduk desa tersebut ada yang sebagai pedagang, guru dan lain-lain. Jenis pekerjaan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5
Jenis Pekerjaan Desa Patongloan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1.	Petani/Pekebun	513	40,6%
2.	Pelajar/Mahasiswa	58	4,6%
3.	Ibu Rumah Tangga	295	23,4%
4.	Pedagang	5	0,4%
5.	Pegawai Swasta	9	0,7%
6.	Pensiunan	5	0,4%
7.	Guru/Dosen	5	0,4%
8.	Industri/Wiraswasta	30	2,4%
9.	Buruh Tani	75	5,9%
10.	Bidan/Tenaga Medis	10	0,8%
11.	Pegawai Negeri	4	0,3%
12.	Belum/Tidak Bekerja	247	19,7%
13.	Lainnya	5	0,4%
Total		1.261	100%

Sumber: Profil Desa Patongloan 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebgaaian besar masyarakat desa Patongloan bekerja sebagai petani/pekebun sebanyak 513 jiwa atau 40,6%, masyarakat yang berkerja sebagai pelajar sebanyak 58 jiwa atau 4,6%, masyarakat yang berkerja sebagai Ibu Rumah Tangga sebanyak 295 jiwa atau 23,4%, masyarakat yang berkerja sebagai pedagang sebanyak 5 jiwa atau 0,4%, masyarakat yang berkerja sebagai pegawai swasta sebanyak 9 jiwa atau 0,7%, masyarakat yang berkerja sebagai pensiunan sebanyak 5 jiwa atau 0,4%, masyarakat yang berkerja sebagai guru sebanyak 5 jiwa atau 0,4%, masyarakat yang berkerja sebagai wiraswasta/industri sebanyak 30 jiwa atau 2,4%, masyarakat yang berkerja sebagai Buruh tani sebanyak 75 jiwa atau 5,9%, masyarakat yang berkerja sebagai bidan/tenaga medis sebanyak 10 jiwa atau 0,8%, masyarakat yang berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4 jiwa atau 0,3%, masyarakat yang belum berkerja atau tidak bekerja sebanyak 247 jiwa atau 19,7%, sedangkan pekerjaan lainnya sebanyak 5 jiwa atau 0,4%.

C. Paparan dan Reduksi Data

I. Tahap Assesment

Tahap assessment dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri. Keterlibatan dalam perencanaan pembangunan masyarakat sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan, dalam teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pembangunan bukan hanya dimulai pada saat rapat perencanaan ataupun pada implementasinya tetapi

dalam hal ini, masyarakat seharusnya berpartisipasi pada saat pengidentifikasian masalah.

Dalam perencanaan pembangunan desa banyak hal yang dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya pembangunan Desa. Pada tahapan assessment data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Patongloan menurut pengamatan penulis dilapangan, responden memberikan jawaban mengenai data-data yang dibutuhkan diantaranya hasil wawancara dengan informan.

Hasil wawancara dengan Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

*“Menurut saya perencanaan pembangunan desa sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan agar desa tidak tertinggal”.
(wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan)*

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Atto Sainal tersebut, hal ini sejalan dengan penyusunan perencanaan pembangunan desa yang telah dituangkan dalam RPJMDesa Patongloan yang diperlihatkan kepada peneliti setelah melakukan wawancara, dan data tersebut dijadikan olah data oleh peneliti dan dapat dilihat dalam Matriks RPJMDesa Patongloan seperti pada gambar berikut :

Gambar 4
Matriks RPJMDesa Patongloan

No	No. Urut	Nama Kegiatan	Lokasi (RT/Desa/Desa)	Profilaxis	Jenis dan Momen	Tahun Pelaksanaan						Estimasi Biaya dan Sumber Pendanaan		Status		
						2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011		10 (Rp)	Sumber
1	1	Bantuan Penghasilan tetap dan Tunjangan Keadilan dan		Penghasilan	12	Sesuai Desa	x	x	x	x	x	x		78.000.000	APBDDes	x
		Bantuan operasional pemerintahan		Penghasilan	13	Sesuai Desa	x	x	x	x	x	x		34.440.000	APBDDes	x
		Bantuan operasional SD/PA		Penghasilan	10	SD/PA	x	x	x	x	x	x		227.000	APBDDes	x
		Bantuan operasional dibidang pemerintahan (PMP)		Penghasilan	7	PMP	x	x	x	x	x	x		2.722.000	APBDDes	x
		Bantuan operasional UPT Desa		Penghasilan	12	Sesuai Desa	x	x	x	x	x	x		2.300.000	APBDDes	x
		Penghasilan untuk pelayanan teknis Desa		Penghasilan		Sesuai Desa	x	x	x	x	x	x		2.220.000	APBDDes	x
		Bantuan dan pengisian buku Desa		Penghasilan		Sesuai Desa	x	x	x					1.000.000	APBDDes	x
		pendapatan Desa		Penghasilan		Sesuai Desa	x	x	x	x	x	x		5.200.000	APBDDes	x
		Bantuan dan pengisian buku		Penghasilan		Sesuai Desa	x	x	x					20.000.000	APBDDes	x
		Pengembangan Program studi Desa		Penghasilan		Sesuai Desa	x	x	x	x	x	x			APBDDes	x
		Pengembangan program studi Desa		Penghasilan		Sesuai Desa	x	x	x	x	x	x			APBDDes	x
		Pengembangan Program studi Desa		Penghasilan		Sesuai Desa	x	x	x	x	x	x		2.700.000	APBDDes	x
		Pengembangan program studi Desa		Penghasilan		Sesuai Desa	x	x	x	x	x	x			APBDDes	x
		Pengembangan program studi Desa		Penghasilan		Sesuai Desa	x	x	x	x	x	x		20.000.000	APBDDes	x
		pengembangan program studi Desa		Penghasilan		Sesuai Desa	x	x	x	x	x	x		30.000.000	APBDDes	x
		Bantuan Desa untuk tanggul Desa - galian		Desa Patongloan	1	Wawancara Pengantar	x								APBDDes	x

Sumber : RPJM Desa Patongloan

Pernyataan dari bapak Atto Sainal juga dipertegas oleh Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Saparuddin yang menyatakan bahwa:

“Perencanaan pembangunan desa sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan” (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017)

Pendapat Bapak Saharuddin tersebut didukung oleh informan dengan tokoh masyarakat lainnya yaitu Drs. Ali Tandirerung yang menyatakan:

“Menurut saya perencanaan sangat dibutuhkan dan sebaiknya masyarakat ikut berpartisipasi. (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017, Drs. Ali Tandirerung, tokoh masyarakat).

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Sumule selaku Tokoh Adat sebagai berikut:

“Perencanaan pembangunan desa Patongloan sangat dibutuhkan dalam untuk kemajuan desa” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017).

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Masyarakat Bapak Drs. Ali Tandirerung yang juga sepakat dengan informan sebelumnya, beliau menyatakan bahwa:

“Perencanaan pembangunan itu perlu dilakukan agar desa terlihat baik dan memiliki kemajuan dalam hal pembangunan” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Hal senada diungkapkan oleh informan lain yang diwawancarai yaitu Bapak Saharuddin dan Bapak Upa yang mengatakan bahwa pembangunan itu perlu dilakukan agar desa terlihat baik dan memiliki kemajuan dalam hal pembangunan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa perencanaan pembangunan Desa Patongloan sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa agar desa tidak tertinggal.

Mengenai data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan Desa, wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa itu beragam, mulai dari kondisi masyarakat, infrastruktur jalan, jembatan, perkantoran, irigasi, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, keterjangkauan dan kebutuhan lain”. (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Hal ini dikuatkan oleh Tokoh Agama yaitu Bapak Saharuddin yang menyatakan bahwa:

“Data yang dibutuhkan yaitu kondisi infrastruktur jalan, jembatan, keterjangkauan, dan kebutuhan lainnya.” (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017).

Keterangan yang diberikan informan tersebut hal didukung dengan data masalah Desa yang diperoleh dari Aparat Desa Patongloan terkait data yang dibutuhkan dalam Perencanaan Pembangunan Desa, seperti yang tampak pada gambar Data Daftar Prioritas Masalah Desa Patongloan berikut ini :

Gambar 5
Data Masalah Desa

No	MASALAH	DUSUN (DUSUN/RW/RT)
1	Pengaspalan Jalan Perse Lumbaji - Tangga	Dusun Patongloan
2	Pengaspalan Jalan Perse Kampung Baru - La'ko' Tedatio	Dusun Redak
3	Pembangunan Gedung Kantor SMPN 5 Alla	Dusun Redak
4	Pembangunan RKH SMPN 5 Alla	Dusun Redak
5	Pagar Lokasi SMPN 5 Alla	Dusun Redak
6	Pembangunan Gedung Masyarakat	Dusun Rante Baba
7	Pembangunan Gedung TK Perliwi Redak	Dusun Rante baba
8	Pembangunan Jembatan Sialu Baru	Dusun Leme
9	Perintisa Jalan Tani Karang - Leme	Dusun Leme
10	Perintisa Jalan Wisata Benteng Alla	Dusun Karang
11	Pengaspalan Jalan Karang Baru - Galitin	Dusun Redak
12	Pengaspalan Jalan Redak - Leme	Dusun Redak/Leme
13	Pengaspalan Jalan Rante Baba - Leme	Dusun Rante Baba - Leme
14	Pembangunan Lapangan SMPN 5 Alla	Dusun Redak
15	Renovasi Masjid	Dusun Karang
16	Renovasi Masjid	Dusun Rante baba
17	Penyelesaian Masjid Suhuata Kampung Baru	Dusun Redak
18	Pembangunan Sanggar Tani	Dusun Redak
19	Pembangunan Rante Baba	Dusun Redak
20	Pembangunan Jalan Setapak NDN 10 Redak	Dusun Rante Baba
21	Pembangunan Mushallah Dusun Karang	Dusun Redak
22	Pembangunan Mushallah SMPN 5 Alla	Dusun Karang
23	Pembangunan Tanggaul NDN 10 Redak	Dusun Redak
24	Pengadaan Guru Agama Kristen SMPN 5 Alla	Dusun Rante baba
25		Dusun Redak

Sumber : Dokumen Musrenbang Desa Patongloan

Gambar 5 di atas diperlihatkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan yaitu Bapak Saparuddin setelah wawancara, dan hal tersebut dipertegas dengan jawaban yang diberikan terkait data yang dibutuhkan dalam perencanaan Pembangunan Desa, sebagai berikut:

“Data sarana dan prasarana sosial, potensi setiap dusun, jalan tani, perkantoran, dekker, dan kelembagaan merupakan data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa.” (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017, Saparuddin, Kasi Pemerintahan).

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Sumule selaku Tokoh Adat sebagai berikut:

“Data, potensi setiap dusun dan kelembagaan, jalan, dan jembatan (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Masyarakat Bapak Drs Ali Tandirerung, beliau menyatakan bahwa: .

“Data yang dibutuhkan adalah kelembagaan desa, jalan desa dan sebagainya” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan Bapak Amrullah Ballohe menyatakan bahwa:

“Potensi setiap dusun, infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, perkantoran, jumlah kepala keluarga dan masih banyak data lainnya.” (wawancara pada tanggal 20 Oktober 2017)

Sementara wawancara yang dilakukan dengan Bapak Upa, S.Pd menyatakan bahwa:

“Kondisi masyarakat, kondisi jalan, jembatan, keterjangkauan dan kebutuhan yang lainnya” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan itu bermacam-macam seperti kondisi jalan dan gedung perkantoran, jembatan, kondisi masyarakat, jumlah kepala keluarga dan lain-lain.

Selanjutnya mengenai yang dilibatkan dalam pengumpulan data terkait perencanaan musrembang, hasil wawancara dengan Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

”Yang dilibatkan dalam pengumpulan data terkait perencanaan musrembang diantaranya masyarakat, kepala dusun, kelompok tani, dan lembaga sosial masyarakat” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan)

Hal ini dipertegas oleh Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Saparuddin yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Patongloan, beliau menyatakan bahwa:

“Masyarakat, kepala dusun, kelompok tani, dan lembaga sosial masyarakat (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017)

Dari pernyataan yang didapatkan dari beberapa informan melalui wawancara, sebagaimana dikuatkan pada pelaksanaan pengumpulan data terkait masalah Desa pada pelaksanaan *assessment* yang dilaksanakan oleh unsur masyarakat seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 6

Pelaksanaan *assessment* dalam rangka penetapan masalah



Sumber : RPJM Desa Patongloan

Dari gambar 6 di atas dapat terlihat pelaksanaan rembuk untuk menentukan prioritas masalah, hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Tokoh Agama yaitu bapak Saharuddin yang menyatakan pendapatnya tentang pertanyaan terkait yang dilibatkan dalam pengambilan data pelaksanaan Musrenbang Desa, beliau menyatakan bahwa: .

“Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kepala Dusun, Lembaga-lembaga lainnya.” (wawancara pada tanggal 18 Oktober 2017)

Pendapat informan tersebut juga didukung oleh bapak Sumule selaku Tokoh Adat yang menyatakan sebagai berikut:

Masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, tokoh adat, kelompok tani, dan lembaga sosial masyarakat (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawan cara dari beberapa informan tersebut dan olah data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan Pembangunan Desa telah melibatkan masyarakat dalam pengumpulan data terkait perumusan masaalah dalam pelaksanaan Musrembang, diantaranya yang dilibatkan yaitu Kepala Dusun, Kelompok Tani, dan Lembaga Sosial Masyarakat. Hal tersebut juga dapat diperkuat dengan olah data dengan adanya daftar hadir peserta dalam pengumpulan data, seperti pada gambar berikut :

Gambar 7
Daftar hadir peserta dalam pengumpulan data

No	Nama	Tanda Tangan
1	Alif	[Signature]
2	[Name]	[Signature]
3	[Name]	[Signature]
4	[Name]	[Signature]
5	[Name]	[Signature]
6	[Name]	[Signature]
7	[Name]	[Signature]
8	[Name]	[Signature]
9	[Name]	[Signature]
10	[Name]	[Signature]
11	[Name]	[Signature]
12	[Name]	[Signature]
13	[Name]	[Signature]
14	[Name]	[Signature]
15	[Name]	[Signature]

Sumber : RPJM Desa Patongloan

Dari gambar 7 tersebut menunjukkan bahwa pengidentifikasin masalah di Desa Patongloan telah melibatkan Masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan yaitu Upa, S.Pd selaku Tokoh Pendidik Desa Patongloan terkait pertanyaan bahwa apakah dilibatkan pengumpulan data terkait perencanaan pembangunan, dan beliau menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah, iya, saya ikut dilibatkan.” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017, Upa, S.Pd selaku Tokoh Pendidik).

Pernyataan tersebut sesuai keterangan yang disampaikan oleh Tokoh Masyarakat lainnya yaitu Drs. Ali Tandirerung yang menyatakan:

“Sejauh ini saya masih dilibatkan dalam pengumpulan data terkait dengan perencanaan musrembang desa. (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017, Drs. Ali Tandirerung, tokoh masyarakat).

Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan Tokoh Agama yaitu Saharuddin terkait pertanyaan bahwa adakah penyampaian terhadap pelaksanaan Musrenbang Desa, dan jawaban dari beliau adalah :

“Ia, dan Kadang saya mengetahui rencana pelaksanaan musrembang hanya dari mulut kemulut tidak secara langsung”. (wawancara tanggal 18 Oktober 2017, Bapak Saharuddin, Tokoh Agama Desa Patongloan).

Berdasarkan hasil wawancara, hasil observasi, dan telaah dokumen dapat disimpulkan bahwa pada tahap *assessment* atau dalam pengidentifikasian masalah dilapangan, terlihat partisipasi masyarakat dapat dikatakan baik yakni masyarakat telah peka terhadap fenomena serta realita yang sedang terjadi disekitar mereka, bahkan telah memberikan masukan kepada pihak pemerintah akan terkait data mengenai kebutuhan masyarakat.

II. Tahap Perencanaan Alternatif Program

Tahap perencanaan alternatif program dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memberikan beberapa alternatif program. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni yang pertama, fokus perencanaan berdasarkan pada sosialisasi prosedur dan manfaat perencanaan musrembang Desa yang dihadapi masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting dan juga sangat dibutuhkan karena masyarakatlah yang menentukan prioritas dari perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. pemerintah desa merupakan wadah aspirasi masyarakat, sehingga tidak akan terlihat jelas peran pemerintah desa seperti apa jika tidak ada partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan, dan program kebijakan Pemerintah tidak bisa berhasil dengan baik kalau tidak didukung dengan partisipasi masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

*“Sosialisasi prosedur dan manfaat perencanaan musrembang Desa disampaikan melalui kegiatan perkumpulan masyarakat seperti pada pesta pernikahan, kegiatan keagamaan ataupun juga kematian.”
(wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).*

Pernyataan dari Bapak Atto Sainal tersebut dipertegas oleh Tokoh pemuda yang diwawancarai oleh peneliti yaitu Bapak Saparuddin yang menyatakan bahwa:

“Perencanaan musrembang Desa disampaikan melalui kegiatan perkumpulan masyarakat seperti pada pesta pernikahan, kegiatan keagamaan dan lain-lain. (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017)

Sedangkan wawancara dengan lainnya dengan tokoh Agama yaitu Bapak Saharuddin yang menyatakan bahwa:

“Kadang-kadang pada saat ada rapat atau dikegiatan sosial kemasyarakatan.” (wawancara pada tanggal 18 Oktober 2017)

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Sumule selaku Tokoh Adat sebagai berikut:

“Perencanaan musrembang Desa disampaikan melalui kegiatan perkumpulan masyarakat seperti pada saat rapat, pesta dan lain-lain.” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Masyarakat Bapak Drs Ali Tandirerung, beliau menyatakan bahwa:

“Iya pada saat ada pesta biasanya perencanaan tentang musrembang itu disampaikan”.(wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi tentang prosedur dan manfaat perencanaan musrembang desa biasa dilakukan oleh pemerintah desa pada acara pesta pernikahan, kegiatan keagamaan ataupun juga kematian.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan terkait pertanyaan bahwa seberapa penting pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, beliau menyatakan bahwa:

“Keterlibatan masyarakat itu sangat dibutuhkan tetapi masyarakatlah sendiri yang menentukan prioritas perencanaan pembangunan tersebut.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Hal ini dipertegas oleh Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Saparuddin yang menyatakan bahwa:

*“Masyarakatlah yang menentukan prioritas pembangunan”
(wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017)*

Dan hal yang sama disampaikan oleh Bapak Amrullah Ballohe selaku Tokoh Pemuda tentang pertanyaan bahwa apakah masyarakat memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan, dan jawaban yang disampaikan sebagai berikut:

“Memberi masukan dalam hal kebutuhan masyarakat yang mendesak.” (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan Bapak Amrullah Ballohe selaku Tokoh Pemuda).

Dari pernyataan informan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Patongloan ikut berpartisipasi dan memberikan masukan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, hal ini diperkuat dengan adanya olah data sebagaimana pada gambar di bawah ini :

Gambar 8
Musyawah RKP Desa



Sumber : RKP Desa Patongloan

Pada gambar 8 di atas dapat dibuktikan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dan memberikan masukan pada perencanaan pembangunan desa, yang mana salah satu dari peserta musyawarah memberikan masukan terkait kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan prioritas dalam rencana pembangunan desa. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari informan yaitu bapak Saharuddin sebagai Tokoh Agama, yang menyatakan bahwa:

“Sangat penting karena kita tidak dapat memutuskan pembangunan yang akan dilaksanakan tanpa ada saran dari masyarakat.” (wawancara pada tanggal 18 Oktober 2017)

Keterangan serupa juga sesuai dengan hasil Wawancara selanjutnya yaitu Bapak Sumule selaku Tokoh Adat, dan dia menyatakan bahwa:

“Penting sekali demi kemajuan pembangunan.” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Masyarakat Bapak Drs Ali Tandirerung, beliau menyatakan bahwa:

“Sangat penting karena mereka yang memberikan aspirasi pembangunan.” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Mengenai masyarakat yang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa, Jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Yang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan Desa diantaranya BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala dusun, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Hal ini dipertegas oleh Tokoh Masyarakat dan juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan yaitu Bapak Saparuddin yang menyatakan bahwa:

“BPD, Tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala dusun, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat.” (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017).

Setelah melaksanakan wawancara dengan Bapak Saparuddin yang mana dapat diketahui berdasarkan keterangan yang diberikan bahwa pelaksanaan Musrenbang Desa telah melibatkan semua unsur masyarakat, kemudian informan tersebut memperlihatkan dokumen Musrenbang sebagaimana yang diperlihatkan pada gambar berikut:

Gambar 9
Musrenbang Desa Patongloan



Sumber : Dokumen Musrenbang Desa Patongloan tahun 2017

Selanjutnya pada gambar 9 di atas menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Desa, hal ini dikuatkan kembali dengan informan selanjutnya yaitu Pak Saharuddin selaku Tokoh Agama dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Dalam perencanaan pembangunan Desa biasanya melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari setiap dusun.” (wawancara pada tanggal 18 Oktober 2017, Bapak Saharuddin, Tokoh Agama).

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Sumule selaku Tokoh Adat sebagai berikut:

“Aparat desa, tokoh masyarakat, kepala desa dan kepala dusun.” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Masyarakat Bapak Drs Ali Tandirerung, beliau menyatakan bahwa:

“kepala Dusun, Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari setiap dusun.” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Setelah mencermati pernyataan yang disampaikan oleh semua informan yang telah diwawancarai oleh peneliti tentang pelibatan masyarakat dalam Musrenbang Desa yang mana semua unsur masyarakat terlibat, hal ini diperkuat dengan olah data terkait daftar hadir Musrenbang Desa, seperti pada gambar berikut:

Gambar 10
Daftar Hadir Peserta Musrenbang Desa Patongloan

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kampung, 28 Desember 2016
 Kepala Desa Patongloan
 [Signature]

Sumber : Dokumen Musrenbang Desa Patongloan tahun 2016

Dari gambar 10 di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Patongloan ikut berpartisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa, gambar tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Amrullah Ballohe terkait pertanyaan tentang

siapa yang dilibatkan dalam Musrenbang Desa, dan beliau menyatakan bahwa:

“BPD, kepala dusun tokoh masyarakat, tokoh adat.” (wawancara pada tanggal 20 Oktober 2017)

Dan juga hal yang sama yaitu wawancara dilakukan dengan Bapak Upa, S.Pd, dan menyatakan bahwa:

“BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala dusun, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat.” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Perencanaan pembangunan biasanya melibatkan aparat desa, BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan perwakilan setiap dusun.

Wawancara selanjutnya mengenai apakah masyarakat ikut memberikan saran atau masukan terkait perencanaan pembangunan desa dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Adakalanya memberikan saran dan adakalanya juga tidak memberikan saran atau masukan.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Hal ini dipertegas oleh Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Saparuddin yang menyatakan bahwa:

“Iya, saya biasanya memberikan masukan untuk pembangunan yang lebih maju”(wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017)

Sedangkan jawaban yang di peroleh peneliti dari informan yaitu Bapak Amrullah Ballohe selaku tokoh pemuda sebagai berikut:

“Iya, saya ikut memberikan saran.” (Wawancara pada tanggal 05 Oktober 2017).

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Sumule selaku Tokoh Adat sebagai berikut:

“Kadang saya memberikan masukan.” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Masyarakat Bapak Drs Ali Tandirerung, beliau menyatakan bahwa:

“Saya sering sekali memberikan masukan mengenai perencanaan pembangunan yang akan dilakukan sebagai pertimbangan untuk aparat desa dan pemerintah.” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan Bapak Amrullah Ballohe menyatakan bahwa:

“Iya sering sekali.”(wawancara pada tanggal 20 Oktober 2017)

Sementara wawancara yang dilakukan dengan Bapak Upa, S.Pd menyatakan bahwa:

“Biasanya saya memberikan masukan, tetapi kadang juga tidak.” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan seperti yang telah diuraikan di atas, dan dengan hasil observasi dan olah dokumen dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan alternatif program di Desa Patongloan semua unsur masyarakat ikut berpartisipasi, dan mereka harus bisa bertanggungjawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam Musrenbang Desa. Perencanaan pembangunan di Desa Patongloan yang ikut terlibat didalamnya meliputi BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Kepala Dusun, dan Tokoh Pendidik.

III. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan keikutsertaan masyarakat untuk membantu baik berupa materi maupun non materi agar suatu pembangunan yang akan dilaksanakan bisa terlaksana sesuai yang direncanakan.

Adapun partisipasi masyarakat yang diharapkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan disini adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan berupa uang, bahan dan tenaga.

Hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Hubungan atau kerjasama pemerintah Desa dengan Masyarakat terkait perencanaan pembangunan sangat baik, Cuma ada kalanya masyarakat tidak hadir ketika diundang.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Hal ini dipertegas oleh Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Saparuddin yang menyatakan bahwa:

“Hubungannya sangat baik”. (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Pak Sumule selaku Tokoh Adat yang mendukung pernyataan dari hasil wawancara sebelumnya, dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembangunan harus didukung dengan baik oleh masyarakat.” (wawancara tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Sumule, Tokoh Adat Desa Patongloan).

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Masyarakat Bapak Drs Ali Tandirerung, beliau menyatakan bahwa:

“Sangat baik sekali.” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan Bapak Amrullah Ballohe menyatakan bahwa:

“Hubungannya sangatlah baik karena pelaksanaan pembangunan harus didukung dengan baik oleh masyarakat.” (wawancara pada tanggal 20 Oktober 2017)

Sementara wawancara yang dilakukan dengan Bapak Upa, S.Pd menyatakan bahwa:

“Sejauh ini terlihat sangat baik.” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan sangat baik.

Hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Biasanya Pemerintah Desa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya perencanaan pembangunan yang akan dilakukan.” (wawancara pada tanggal 04 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Hal ini dipertegas oleh Tokoh pemuda dan juga selaku Kaur Pemerintahan yaitu Bapak Saparuddin yang menyatakan bahwa:

“Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya perencanaan pembangunan yang akan dilakukan.” (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Pak Sumule selaku Tokoh Adat dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“melaksanakan perencanaan pembangunan dan berusaha untuk mendapatkan pembiayaan dari APBD dan APBDes.” (wawancara tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Sumule, Tokoh Adat Desa Patongloan).

Sedangkan wawancara dengan lainnya dengan tokoh Agama yaitu Bapak Saharuddin yang menyatakan bahwa:

“Biasanya pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu.” (wawancara pada tanggal 18 Oktober 2017)

Hal senada diungkapkan oleh informan lain yang diwawancarai yaitu Bapak Saharuddin, Bapak Saparuddin, Bapak Sumule, Bapak Amrullah Ballohe, Bapak Ali Tandirerung dan Bapak Upa yang mengatakan bahwa pemerintah biasanya melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Mengenai yang dilakukan pemerintah Desa untuk mencapai target perencanaan pembangunan di Desa Patongloan dapat diketahui bahwa pemerintah melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pembangunan yang akan dilakukan.

Mengenai program apa saja yang melibatkan masyarakat Desa Patongloan Jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Program yang harus melibatkan masyarakat yaitu perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, evaluasi pembangunan.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Hal ini dipertegas oleh Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Saparuddin yang menyatakan bahwa:

“Seperti perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, evaluasi pembangunan.” (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017)

Sedangkan wawancara dengan lainnya dengan tokoh Agama yaitu Bapak Saharuddin yang menyatakan bahwa:

“Kerja bakti, juga gotong royong dan pembangunan-pembangunan.” (wawancara pada tanggal 18 Oktober 2017)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Pak Sumule selaku Tokoh Adat dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, kerja bakti dan juga gotong royong.” (wawancara tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Sumule, Tokoh Adat Desa Patongloan).

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Masyarakat Bapak Drs Ali Tandirerung, beliau menyatakan bahwa:

“Pembangunan, gotong royong, kerja bakti dan lain-lain.” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan Bapak Amrullah Ballohe menyatakan bahwa:

“Perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, evaluasi pembangunan. (wawancara pada tanggal 20 Oktober 2017)

Sementara wawancara yang dilakukan dengan Bapak Upa, S.Pd menyatakan bahwa:

“Rapat-rapat seperti Musrembang, kerja bakti, gotong royong, melaksanakan pembangunan dan lain-lain.” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Mengenai keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, Jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Iya, Masyarakat Ikut.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Hal ini dipertegas oleh Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Saparuddin yang menyatakan bahwa:

“Iya, Selalu Ikut.” (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017)

Sedangkan wawancara dengan lainnya dengan tokoh Agama yaitu Bapak Saharuddin yang menyatakan bahwa:

“Kadang masyarakat ikut dan kadang juga tidak. (wawancara tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat Desa Patongloan). (wawancara pada tanggal 18 Oktober 2017)

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Sumule selaku Tokoh Adat sebagai berikut:

“Iya, masyarakat selalu ikut.” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Hal senada diungkapkan oleh informan lain yang diwawancarai yaitu Bapak Amrullah Ballohe, Bapak Ali Tandirerung dan Bapak Upa yang mengatakan bahwa masyarakat selalu ikut dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah di programkan di Desa Patongloan.

Dari pernyataan informan tersebut diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang mana masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 11
Rabat Beton Jalan Desa



Sumber : Data Pribadi Peneliti

Berdasarkan pada gambar 11 di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Patongloan ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, gambar tersebut merupakan data pribadi penulis yang didokumentasikan pada saat melaksanakan observasi pada tanggal 06 Oktober 2017. Hal ini juga didukung dengan olah data yaitu daftar pekerja yang ikut dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sebagaimana pada gambar berikut :

Gambar 12
Daftar Pekerja Rabat Beton Jalan

NO	NAMA PEKERJA	TANDA TANGAN	TANDA TANGAN
1	KHAB	[Signature]	[Signature]
2	Sampo	[Signature]	[Signature]
3	BAMARUSAN	[Signature]	[Signature]
4	MURJANI	[Signature]	[Signature]
5	Lucinda AB. FANPA	[Signature]	[Signature]
6	Herina P.	[Signature]	[Signature]
7	etia	[Signature]	[Signature]
8	ita	[Signature]	[Signature]
9	Ind. Cande H. Tugles	[Signature]	[Signature]
10	Randa	[Signature]	[Signature]
11	Abd. Tawid An. Spd.	[Signature]	[Signature]
12	Murjanah	[Signature]	[Signature]
13	Ryhu Indu Cista	[Signature]	[Signature]
14	JUGIANTO	[Signature]	[Signature]
15	INDISSA	[Signature]	[Signature]
16	Lain	[Signature]	[Signature]
17	ABELUNG	[Signature]	[Signature]
18	Singgur	[Signature]	[Signature]
19	SOPARRANG	[Signature]	[Signature]
20	etting	[Signature]	[Signature]
21	Amber ELBI	[Signature]	[Signature]
22	DEHESI	[Signature]	[Signature]
23	AB. MARNI	[Signature]	[Signature]
24	Suparuddin	[Signature]	[Signature]
25	ABIS	[Signature]	[Signature]
26	Ma, Pardi	[Signature]	[Signature]

Sumber : RKPDesa Patongloan tahun 2017

Berdasarkan pada uraian hasil wawancara, hasil observasi, serta olah dokumen dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Patongloan ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan dan mereka diharapkan bertanggungjawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam Musrenbang tingkat desa dan seterusnya. Pada tahap pelaksanaan, hubungan masyarakat dengan pemerintah Desa terkait perencanaan pembangunan sangat baik, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Patongloan, sehingga bisa dikatakan pemerintah berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

IV. Tahap Evaluasi

Evaluasi pada program pembangunan memang seharusnya dilakukan minimal setahun sekali, guna mengetahui perubahan pembangunan baik itu bersifat fisik maupun nonfisik.

Kegiatan pemerintah Desa merupakan peran serta masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dibangun, melakukan pemeliharaan serta pemantauan baik dari pihak pemerintah Desa sendiri maupun bersama pihak masyarakat yang ada di Desa Patongloan.

Pemberian masukan atau solusi terhadap masalah yang timbul dalam pembangunan desa, peneliti mendapatkan jawaban dari hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Tidak semua masyarakat memberi masukan tetapi ada sebagian dari masyarakat yang ikut memberikan solusi.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Biasanya memberikan masukan, dan pemerintah Desa yang memberikan solusi. (wawancara tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat Desa Patongloan).

Sedangkan wawancara dengan lainnya dengan tokoh Agama yaitu Bapak Saharuddin yang menyatakan bahwa:

“Kadang ia, kadang juga tidak” (wawancara pada tanggal 18 Oktober 2017).

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Sumule selaku Tokoh Adat sebagai berikut:

“Kebanyakan memberikan masukan, kemudian yang memberikan solusi adalah pemerintah sendiri.” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017).

Kemudian wawancara yang dilakukan dengan Bapak Amrullah Ballohe menyatakan bahwa:

“Biasanya masyarakat memberikan masukan dan solusinya” (wawancara pada tanggal 20 Oktober 2017)

Sementara wawancara yang dilakukan dengan Bapak Upa, S.Pd menyatakan bahwa:

“Ada sebagian dari masyarakat yang ikut memberikan solusi. (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Mengenai masalah pelaksanaan yang timbul dalam pembangunan Desa, biasanya ada masyarakat memberikan masukan, tetapi ada juga yang tidak memberikan masukan.

Mengenai keikutsertaan masyarakat bekerja dalam kegiatan pembangunan desa, jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Ya, masyarakat ikut bahkan aktif bekerja dalam kegiatan pembangunan Desa.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Hal ini dipertegas oleh Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Saparuddin yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat ikut bekerja.” (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017)

Pendapat informan tersebut sesuai dengan jawaban dari tokoh Agama yaitu Bapak Saharuddin yang menyatakan bahwa:

“Iya, masyarakat ikut bekerja”. (wawancara pada tanggal 18 Oktober 2017)

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Sumule selaku Tokoh Adat sebagai berikut:

“Iya, masyarakat ikut bekerja”. (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Iya, ikut bekerja jika ada kegiatan pembangunan Desa. (wawancara tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat Desa Patongloan).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa masyarakat aktif dalam pembangunan desa dan juga antusias ikut serta dalam bekerja melaksanakan pembangunan.

Hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Iya, Sebagian besar masyarakat ikut memelihara hasil-hasil pembangunan Desa.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Pernyataan Bapak Atto Sainal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Iya, kami ikut memelihara hasil pembangunan Desa. (wawancara tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat Desa Patongloan).”

Mengenai pemeliharaan hasil pembangunan, masyarakat ikut serta memelihara hasil-hasil pembangunan desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Iya, masyarakat ikut menikmati hasil pembangunan Desa.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Iya, kami turut menikmati manfaat dari hasil pembangunan Desa yang telah dilaksanakan. (wawancara tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat Desa Patongloan).

Berdasarkan pernyataan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa di Desa Patongloan masyarakat ikut melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, yang mana masyarakat turut serta dalam kegiatan pembangunan dan secara langsung juga dapat mengawasi kegiatan pembangunan, seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 13
Rabat Beton Jalan Tani



Sumber : Data Pribadi Peneliti

Pada gambar 13 di atas nampak masyarakat turut serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan sekaligus mengawasi apa yang mereka lakukan dalam kegiatan tersebut. Hal ini dikuatkan dengan olah dokumen tentang pelaksanaan musyawarah evaluasi program seperti pada gambar berikut:

Gambar 14
Musyawaharah Evaluasi Program Pembangunan



Sumber : RKPDesa Patongloan tahun 2017

Berdasarkan hasil wawancara, dan hasil observasi, serta telaah dokumen dapat disimpulkan bahwa pada tahap evaluasi masyarakat ikut berpartisipasi baik dalam pelaksanaan pembangunan, maupun dalam memberikan informasi terkait dengan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga pemanfaatan serta menjaga hasil-hasil pembangunan Desa.

D. Hasil Analisis Data

Berikut ini peneliti akan mengkajikan beberapa indikator yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Assesment

Tahap assesment dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri. Keterlibatan dalam perencanaan pembangunan masyarakat sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan, dalam

teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pembangunan bukan hanya dimulai pada saat rapat perencanaan ataupun pada implementasinya tetapi dalam hal ini, masyarakat seharusnya berpartisipasi pada saat pengidentifikasian masalah.

Dalam perencanaan pembangunan desa banyak hal yang dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya pembangunan Desa. Pada tahapan assessment data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Patongloan menurut pengamatan penulis dilapangan, responden memberikan jawaban mengenai data-data yang dibutuhkan diantaranya hasil wawancara dengan informan.

Bagaimana pendapat anda tentang perencanaan pembangunan desa? Hasil wawancara dengan Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Menurut saya perencanaan pembangunan desa sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan agar desa tidak tertinggal”. (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan)

Hal ini dipertegas oleh tokoh masyarakat yaitu Bapak Drs. Ali Tandirerung yang menyatakan:

“Menurut saya perencanaan sangat dibutuhkan dan sebaiknya masyarakat ikut berpartisipasi.” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017, Drs. Ali Tandirerung, tokoh masyarakat).

Dalam perencanaan pembangunan desa banyak hal yang dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya pembangunan Desa. Pada tahapan assessment data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan Desa di Desa Patongloan menurut pengamatan penulis dilapangan, responden memberikan jawaban mengenai data-data yang dibutuhkan diantaranya hasil wawancara

dengan informan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa itu beragam, mulai dari kondisi masyarakat, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, infrastruktur jalan, jembatan, perkantoran”. (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Senada dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Saparuddin selaku Kaur Pemerintahan yang menyatakan:

“Data penduduk, potensi setiap dusun, jalan, jembatan, kelembagaan merupakan data yang dibuthkan dalam perencanaan pembangunan desa.” (wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017, Saparuddin, kaur pemerintahan).

Berdasarkan wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa dalam perencanaan pembangunan di Desa Patongloan, data-data yang dibutuhkan beragam seperti kondisi masyarakat, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, keterjangkauan dan kebutuhan, data penduduk, potensi setiap dusun dan kelembagaan merupakan data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa.

Masyarakat dibolehkan untuk ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan Desa dan mereka harus bisa bertanggungjawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam Musrenbang tingkat Desa dan seterusnya. Untuk mendapatkan data yang terpercaya, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut : Siapa saja yang dilibatkan dalam pengumpulan data terkait perencanaan musreimbang?

Adapun jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

”Yang dilibatkan dalam pengumpulan data terkait perencanaan musrembang diantaranya masyarakat, kepala dusun, kelompok tani, dan lembaga sosial masyarakat”. (wawancara pada tanggal 4 Oktober 2017, Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Hal ini dipertegas oleh Bapak Upa, S.Pd selaku Tokoh Pendidik Patongloan yang juga mereka dilibatkan dalam proses pengumpulan data terkait perencanaan Desa, berikut pernyataannya:

“Alhamdulillah, iya, saya ikut dilibatkan.” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Upa, S.Pd selaku Tokoh Pendidik).

Sedangkan wawancara dengan tokoh masyarakat lainnya yaitu Bapak Drs. Ali Tandirerung yang menyatakan:

“Sejauh ini saya masih dilibatkan dalam pengumpulan data terkait dengan perencanaan musrembang desa. (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Drs. Ali Tandirerung, tokoh masyarakat).

Wawancara diatas bisa kita lihat bahwa masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses pengumpulan data terkait dengan perencanaan pembangunan. Terkait dengan pernyataan dari Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat seperti diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat di Desa Patongloan terkesan sangat aktif, karena kesadarannya dari masing-masing individu, apalagi dengan gotong royong dan kebersamaan masih terjalin baik antarwarga, karena mereka lebih mementingkan kepentingan umum daripada urusannya masing-masing.

Pada saat rapat yang diadakan barulah RT/RW menyampaikan informasi yang di dapatkan dari masyarakat. Selain itu masyarakat yang mengikuti rapat juga memberikan informasi kepada Pemerintah Desa Patongloan. Untuk mendapatkan informasi yang jelas, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan pertanyaan dan jawaban

sebagai berikut: Apakah ada penyampaian tentang rencana pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa? Wawancara dengan tokoh masyarakat lainnya yaitu Bapak Drs. Ali Tandirerung yang menyatakan:

“Ia, ada penyampaian” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Drs. Ali Tandirerung, tokoh masyarakat).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Bapak Saharuddin selaku Tokoh Agama dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Kadang saya hanya mengetahui rencana pelaksanaan musrembang hanya dari mulut kemulut tidak secara langsung”. (wawancara tanggal 18 Oktober 2017, Bapak Saharuddin, Tokoh Agama Desa Patongloan).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahap *assessment* atau dalam pengidentifikasian masalah dilapangan, terlihat partisipasi masyarakat dapat dikatakan baik yakni masyarakat telah peka terhadap fenomena serta realita yang sedang terjadi disekitar mereka, bahkan telah memberikan masukan kepada pihak pemerintah akan hal tersebut.

2. Tahap Perencanaan Alternatif Program

Tahap perencanaan alternatif program dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memberikan beberapa alternatif program. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni yang pertama, fokus perencanaan berdasarkan pada sosialisasi prosedur dan manfaat perencanaan musrembang Desa yang dihadapi masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan Desa sangat penting dan juga sangat dibutuhkan karena masyarakatlah yang menentukan prioritas dari perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa. Pemerintah Desa merupakan wadah aspirasi masyarakat, sehingga tidak akan terlihat jelas peran pemerintah Desa seperti apa jika tidak adanya partisipasi dari masyarakat sendiri dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan seperti rapat, maka program kebijakan pemerintah yang melalui pemerintah Desa tersebut tidak mungkin bisa bergerak, hal itu disebabkan tidak adanya masyarakat yang ikut berpartisipasi.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan didapati hasil dengan pertanyaan wawancara yaitu bagaimana mensosialisasikan prosedur dan manfaat perencanaan musrembang Desa? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

*“Sosialisasi prosedur dan manfaat perencanaan musrembang Desa disampaikan melalui kegiatan perkumpulan masyarakat seperti pada pesta pernikahan, kegiatan keagamaan ataupun juga kematian.”
(wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).*

Sejalan dengan cara mensosialisasikan prosedur dan manfaat perencanaan musrembang desa, pertanyaan penelitian selanjutnya adalah apakah pemerintah desa telah mensosialisasikan prosedur dan manfaat perencanaan musrembang Desa?”. Hasil wawancara dengan Bapak Saparuddin selaku Kaur Pemerintahan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

“Kadang-kadang pada saat ada rapat atau dikegiatan sosial kemasyarakatan”. (Wawancara pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan Bapak Saharuddin selaku Kaur Pemerintahan).

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa dapat diketahui dengan melihat hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan yaitu Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan yang menyatakan bahwa:

“Keterlibatan masyarakat itu sangat dibutuhkan tetapi masyarakatlah sendiri yang menentukan prioritas perencanaan pembangunan tersebut.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam pembangunan Desa sangat penting dan juga sangat dibutuhkan karena masyarakatlah yang menentukan prioritas dari perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa.

Tujuan dari pemerintah Desa sendiri adalah untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat yang ada. Untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai partisipasi masyarakat yang ikut dalam rapat yang diadakan pemerintah Desa Patongloan, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan pertanyaan sebagai berikut: apa yang anda lakukan dalam perencanaan pembangunan desa? adapun jawaban yang peneliti dapatkan dari pertanyaan yang sama yaitu sebagai berikut:

“Memberi masukan dalam hal kebutuhan masyarakat yang mendesak.” (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan Bapak Amrullah Ballohe selaku Tokoh Pemuda).

Hasil wawancara Bapak Amrullah Ballohe selaku Tokoh Pemuda bisa dilihat bahwa beliau sering memberikan masukan dalam rapat yang diadakan pihak pemerintah Desa, tujuan beliau ikut pastinya supaya bisa mengusulkan

apa-apa saja yang menjadi kegiatan prioritas yang akan dilakukan di Desa Patongloan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut: Siapa saja yang dilibatkan dalam dalam perencanaan pembangunan Desa? Jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Yang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan Desa diantaranya BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala dusun, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Pak Saharuddin selaku Tokoh Agama dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Dalam perencanaan pembangunan Desa biasanya melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari setiap dusun.” (wawancara pada tanggal 18 Oktober 2017, Bapak Saharuddin, Tokoh Agama).

Wawancara diatas bisa kita lihat bahwa yang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan Desa yaitu BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala dusun, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat.”

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan keikutsertaan masyarakat untuk membantu baik berupa materi

maupun non materi agar suatu pembangunan yang ingin dilakukan bisa terlaksana dengan baik dan cepat.

Adapun partisipasi masyarakat yang diharapkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan disini adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan berupa uang, bahan dan tenaga.

Hasil penelitian wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa informan dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut: Bagaimana hubungan atau kerjasama pemerintah Desa dengan masyarakat Desa di Desa Patongloan? Jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Hubungan atau kerjasama pemerintah Desa dengan Masyarakat terkait perencanaan pembangunan sangat baik, Cuma ada kalanya masyarakat tidak hadir ketika diundang.” (wawancara pada tanggal 04 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Pak Sumule selaku Tokoh Adat dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembangunan harus didukung dengan baik oleh masyarakat.” (wawancara tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Sumule, Tokoh Adat Desa Patongloan).

Selanjutnya mengenai target yang ingin dicapai peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut: Apa saja yang dilakukan pemerintah Desa untuk mencapai target perencanaan pembangunan di Desa Patongloan? Jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Biasanya Pemerintah Desa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya perencanaan pembangunan yang akan dilakukan.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Pak Sumule selaku Tokoh Adat dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Melaksanakan perencanaan pembangunan dan berusaha untuk mendapatkan pembiayaan dari APBD dan APBD.” (wawancara tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Sumule, Tokoh Adat Desa Patongloan).

Untuk itu partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan sangat menentukan keberhasilan dari suatu pembangunan. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Patongloan dan beberapa warga masyarakat desa Patongloan dapat diketahui bahwa banyak program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan di Desa Patongloan dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut: Program apa saja yang harus melibatkan masyarakat Desa di Desa Patongloan? Jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Program yang harus melibatkan masyarakat yaitu perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, evaluasi pembangunan.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Pak Sumule selaku Tokoh Adat dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, kerja bakti dan juga gotong royong.” (wawancara tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Sumule, Tokoh Adat Desa Patongloan).

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut: apakah masyarakat ikut dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah diprogramkan? Jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Iya, Masyarakat Ikut.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Kadang masyarakat ikut dan kadang juga tidak, tetapi sebagian besar masyarakat ikut serta dan aktif berpartisipasi. (wawancara tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat Desa Patongloan).

Pada tahap pelaksanaan, hubungan masyarakat dengan pemerintah Desa terkait perencanaan pembangunan sangat baik, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Patongloan, sehingga bisa dikatakan pemerintah berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi pada program pembangunan memang seharusnya dilakukan minimal setahun sekali, guna untuk mengetahui perubahan pembangunan baik itu bersifat fisik maupun nonfisik.

Kegiatan pemerintah Desa merupakan peran serta masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dibangun, melakukan pemeliharaan serta pemantauan baik dari

pihak pemerintah Desa sendiri maupun bersama pihak masyarakat yang ada di Desa Patongloan.

Untuk mengetahui pemerintah Desa melakukan evaluasi atau tidak, peneliti langsung saja melakukan wawancara kepada informan-informan yang ada. Dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut: Apakah masyarakat ikut bekerja dalam kegiatan pembangunan Desa? Jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Ya, masyarakat ikut bahkan aktif bekerja dalam kegiatan pembangunan Desa.” (wawancara pada tanggal 04 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Iya, ikut bekerja jika ada kegiatan pembangunan Desa. (wawancara tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat Desa Patongloan).

Memelihara pembangunan yang ada di desa merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh masyarakat setempat agar pembangunang tersebut terawat dan tidak mudah rusak. Untuk mendapatkan data yang lebih terpercaya, peneliti langsung melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan pertanyaan sebagai berikut: Apakah masyarakat ikut memelihara hasil-hasil pembangunan Desa?

Adapun jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Iya, Sebagian besar masyarakat ikut memelihara hasil-hasil pembangunan Desa.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Iya, kami ikut memelihara hasil pembangunan Desa. (wawancara tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat Desa Patongloan).”

Pembangunan di Desa akan terwujud apabila ada kerjasama antara pemerintah Desa bersangkutan dan masyarakat. Karena tugas pemerintah Desa sendiri merupakan untuk mensejahterakan masyarakat dan tempat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk memperoleh data berkaitan mengenai permasalahan tersebut peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan, dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut: apakah masyarakat turut menikmati keuntungan/manfaat hasil pembangunan Desa? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

“Iya, masyarakat ikut menikmati hasil pembangunan Desa.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Iya, kami turut menikmati manfaat dari hasil pembangunan Desa yang telah dilaksanakan.” (wawancara tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat Desa Patongloan).

Dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat membantu berjalannya program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa beserta orang Desa. Program tidak akan bisa tercapai apabila tidak ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat, sehingga untuk mendapatkan pencapaian yang maksimal masyarakat harus bisa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, baik itu yang bersifat tenaga, pikiran maupun materi agar apa yang dilakukan masyarakat dapat termonitoring dengan baik, dan bahkan untuk mengetahui sudah sampai dimana program pemerintah yang telah difasilitasi oleh pemerintah Desa tersebut, sehingga peneliti melakukan wawancara kepada para informan dengan pertanyaan dan jawaban yang peneliti peroleh sebagai berikut: apakah masyarakat ikut dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa? Jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Iya, Masyarakat ikut melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Untuk mengetahui pemerintah Desa melakukan evaluasi atau tidak, peneliti langsung saja melakukan wawancara kepada informan-informan yang ada beserta *key* informan. Dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut: Apakah masyarakat ikut bekerja dalam kegiatan pembangunan Desa? Jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Ya, masyarakat ikut bahkan aktif bekerja dalam kegiatan pembangunan Desa.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Iya, ikut bekerja jika ada kegiatan pembangunan Desa.” (wawancara tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat Desa Patongloan).

Memelihara pembangunan yang ada di desa merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh masyarakat setempat agar pembangunang tersebut terawat dan tidak mudah rusak. Selanjutnya Untuk mendapatkan data yang lebih terpercaya, peneliti langsung melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan pertanyaan sebagai berikut: Apakah masyarakat ikut memelihara hasil-hasil pembangunan Desa? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Iya, Sebagian besar masyarakat ikut memelihara hasil-hasil pembangunan Desa.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

“Iya, kami ikut memelihara hasil pembangunan Desa. (wawancara tanggal 28 Oktober 2017, Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat Desa Patongloan).”

Pembangunan di Desa akan terwujud apabila ada kerjasama antara Lembaga bersangkutan dan masyarakat. Partisipasi masyarakat yang

diperlukan adalah mengikuti kegiatan pemerintah Desa seperti ikut bekerja baik itu dibidang fisik maupun nonfisik yang ada didaerah masing-masing. Untuk memperoleh data berkaitan mengenai permasalahan tersebut peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan, dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut: apakah masyarakat turut menikmati keuntungan/manfaat hasil pembangunan Desa? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

*“Iya, masyarakat ikut menikmati hasil pembangunan Desa.”
(wawancara pada tanggal 04 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal,
Kepala Desa Patongloan).*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

*“Iya, kami turut menikmati manfaat dari hasil pembangunan Desa yang telah dilaksanakan. (wawancara tanggal 28 Oktober 2017,
Bapak Drs. Ali Tandirerung selaku Tokoh Masyarakat Desa
Patongloan).*

Masyarakat yang ikut berperan dalam pelaksanaan operasional pembangunan merupakan suatu hal yang memang sudah seharusnya terjadi. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan operasional pembangunan sangat membantu berjalannya program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa beserta orang Desa. Peneliti melakukan wawancara kepada para informan dengan pertanyaan dan jawaban yang peneliti peroleh sebagai berikut: apakah masyarakat ikut dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa? Jawaban yang peneliti dapatkan

dari hasil wawancara dengan Bapak Atto Sainal selaku Kepala Desa Patongloan menyatakan bahwa:

“Iya, Masyarakat ikut melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.” (wawancara pada tanggal 07 Oktober 2017, Bapak Atto Sainal, Kepala Desa Patongloan).

Pada tahap evaluasi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sudah sangat baik, mereka ikut memberikan informasi terkait dengan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga menikmati serta menjaga hasil-hasil pembangunan Desa.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Tahap Assesment

Tahap assessment dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri. Keterlibatan dalam perencanaan pembangunan masyarakat sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan, dalam teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pembangunan bukan hanya dimulai pada saat rapat perencanaan ataupun pada implementasinya tetapi dalam hal ini, masyarakat seharusnya berpartisipasi pada saat pengidentifikasian masalah. Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan didapati hasil bahwa perencanaan pembangunan di Desa Patongloan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan agar desa tidak tertinggal. Karena tujuan dari perencanaan ini sendiri yaitu untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Patongloan.

Dalam perencanaan pembangunan desa banyak hal yang dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya pembangunan Desa. Pada tahapan assessment data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Patongloan menurut pengamatan penulis di lapangan, responden memberikan jawaban mengenai data-data yang dibutuhkan diantaranya hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pembangunan di Desa Patongloan, data-data yang dibutuhkan beragam seperti kondisi masyarakat, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, keterjangkauan dan kebutuhan, data penduduk, potensi

setiap dusun dan kelembagaan merupakan data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan pada masing-masing desa merupakan bentuk tanggungjawab masing-masing desa untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di desa mereka demi tercapainya pembangunan di segala bidang, baik pembangunan bersifat fisik maupun bidang nonfisik. Masyarakat dibolehkan untuk ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan Desa dan mereka harus bisa bertanggungjawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam Musrenbang tingkat Desa dan seterusnya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat kita ketahui bahwa masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses pengumpulan data terkait dengan perencanaan pembangunan. Terkait dengan pernyataan dari Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat seperti diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat di Desa Patongloan terkesan sangat aktif, karena kesadarannya dari masing-masing individu, apalagi dengan gotong royong dan kebersamaan masih terjalin baik antarwarga, karena mereka lebih mementingkan kepentingan umum daripada urusannya masing-masing.

Kemudian, terkait dengan informasi tentang rencana pelaksanaan pembangunan Desa, Informasi pembangunan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, apalagi yang bersifat membangun. Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan diharapkan bisa memberikan informasi mengenai berjalannya pembangunan dibuat oleh Pemerintah Desa Patongloan. Adapun kegiatan pembangunan yang yang direncanakan dan sedang berjalan tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya informasi dari masyarakat.

Baik menyampaikan melalui rapat, maupun hanya melalui RT/RW setempat. Namun pada saat rapat yang diadakan barulah RT/RW menyampaikan informasi yang di dapatkan dari masyarakat. Selain itu masyarakat yang mengikuti rapat juga memberikan informasi kepada Pemerintah Desa Patongloan.

Pada tahap *assessment* atau dalam pengidentifikasian masalah dilapangan, terlihat partisipasi masyarakat dapat dikatakan baik yakni masyarakat telah peka terhadap fenomena serta realita yang sedang terjadi disekitar mereka, bahkan telah memberikan masukan kepada pihak pemerintah akan hal tersebut.

B. Tahap Perencanaan Alternatif Program

Tahap perencanaan alternatif program dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memberikan beberapa alternatif program. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni yang pertama, fokus perencanaan berdasarkan pada sosialisasi prosedur dan manfaat perencanaan musrembang Desa yang dihadapi masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam keterlibatan dalam perencanaan pembangunan Desa. Ketiga, keterlibatan dalam perencanaan pembangunan Desa yaitu siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan Desa. Keempat, pemberian saran dan masukan dalam perencanaan pembangunan Desa.

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan Desa sangat penting dan juga sangat dibutuhkan karena masyarakatlah yang menentukan prioritas dari perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa. Pemerintah Desa merupakan wadah aspirasi masyarakat, sehingga tidak akan

terlihat jelas peran pemerintah Desa seperti apa jika tidak adanya partisipasi dari masyarakat sendiri dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan seperti rapat, maka program kebijakan pemerintah yang melalui pemerintah Desa tersebut tidak mungkin bisa bergerak, hal itu disebabkan tidak adanya masyarakat yang ikut berpartisipasi. Namun tujuan dari pemerintah Desa sendiri adalah untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat yang ada. Untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai partisipasi masyarakat yang ikut dalam rapat yang diadakan pemerintah Desa Patongloan, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan diantaranya Bapak Amrullah Ballohe selaku Tokoh Pemuda bisa dilihat bahwa beliau sering memberikan masukan dalam rapat yang diadakan pihak pemerintah Desa, tujuan beliau ikut pastinya supaya bisa mengusulkan apa-apa saja yang menjadi kegiatan prioritas yang akan dilakukan di Desa Patongloan.

Masyarakat Desa Patongloan dibolehkan untuk ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan Desa dan mereka harus bisa bertanggungjawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam Musrenbang tingkat Desa dan seterusnya. Dalam Perencanaan pembangunan di Desa Patongloan yang turut serta terlibat didalamnya meliputi BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala dusun, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat.”

C. Tahap Pelaksanaan

Selanjutnya setelah tahap perencanaan adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan keikutsertaan masyarakat untuk membantu baik berupa materi maupun non materi agar suatu pembangunan yang ingin dilakukan bisa terlaksana dengan baik dan cepat.

Adapun partisipasi masyarakat yang diharapkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan disini adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan berupa uang, bahan dan tenaga. Selanjutnya mengenai hubungan atau kerjasama pemerintah Desa dengan masyarakat Desa di Desa Patongloan dalam pelaksanaan pembangunan, hubungan atau kerjasama sangat dibutuhkan dan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan, karena memang pembangunan Desa Patongloan disini sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat desa.

Tidak bisa dipastikan juga bahwa jika masyarakat berpartisipasi dalam mempersiapkan suatu rencana pembangunan, maka dengan sendirinya masyarakat akan berpartisipasi dalam tahap-tahap berikutnya. Hal tersebut karena partisipasi pada tahap pelaksanaan ingin mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk itu partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan sangat menentukan keberhasilan dari suatu pembangunan, partisipasi masyarakat disini sangat dituntut lebih dalam segala hal, karena partisipasi didalam pelaksanaan pembangunan sangat berat, dimana masyarakat diharapkan mampu memberikan partisipasi mereka seoptimal atau sebesar mungkin karena dalam pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih atau tenaga dari pembangunan guna memperlancar proses pelaksanaan pembangunan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Patongloan dan beberapa warga masyarakat desa Patongloan dapat diketahui bahwa banyak program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan di Desa Patongloan. Untuk menentukan keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan di Desa Patongloan, masyarakat diharapkan bisa untuk meningkatkan bentuk partisipasi didalam pelaksanaan pembangunan baik berupa swadaya masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berlangsung atau tenaga dan sumbangan berupa bahan-bahan didalam pelaksanaan pembangunan guna menunjang kelancaran didalam pelaksanaan pembangunan, karena berhasil atau tidaknya suatu pembangunan di Desa Patongloan ini sangat ditentukan dari partisipasi mereka sepenuhnya dan merupakan tanggung jawab masyarakat desa sepenuhnya.

Masyarakat Desa Patongloan dibolehkan untuk ikut melaksanakan pembangunan dan mereka harus bisa bertanggungjawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam Musrenbang tingkat Desa dan seterusnya. Pada tahap pelaksanaan, hubungan masyarakat dengan pemerintah Desa terkait perencanaan pembangunan sangat baik, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Patongloan, sehingga bisa dikatakan pemerintah berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

D. Tahap Evaluasi

Evaluasi pada program pembangunan memang seharusnya dilakukan minimal setahun sekali, guna untuk mengetahui perubahan pembangunan baik itu bersifat fisik maupun nonfisik. Kegiatan pemerintah Desa merupakan peran serta masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan yang memanfaatkan sarana dan

prasarana yang telah dibangun, melakukan pemeliharaan serta pemantauan baik dari pihak pemerintah Desa sendiri maupun bersama pihak masyarakat yang ada di Desa Patongloan.

Memelihara pembangunan yang ada di desa merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh masyarakat setempat agar pembangunang tersebut terawat dan tidak mudah rusak. Adapun pembangunan yang diberikan oleh pemerintah merupakan perwujudan dari kebijakan pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan partisipasi dari masyarakat untuk menjaga dan memelihara pembangun yang sudah ada, maupun pembangunan yang masih dalam proses perencanaan. Pembangunan yang ada di Desa Patongloan yang bisa masyarakat rasakan manfaatnya seperti fasilitas di pasar, perbaikan jalan, WC umum dan lain sebagainya. Jika fasilitas ini bisa dijaga dan dirawat oleh masyarakat setempat, maka pembangunan akan bertahan dalam jangka panjang.

Pembangunan di Desa akan terwujud apabila ada kerjasama antara Lembaga bersangkutan dan masyarakat. Karena tugas pemerintah Desa sendiri merupakan untuk mensejahterakan masyarakat dan tempat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Masalah pembangunan yang ada di desa Desa Patongloan sendiri sudah mulai maksimal karena sudah mulai ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah Desa. Akan tetapi masih ada kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat yang diperlukan adalah mengikuti kegiatan pemerintah Desa seperti ikut bekerja baik itu dibidang fisik maupun nonfisik yang ada didaerah masing-masing.

Masyarakat yang ikut berperan dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu hal yang memang sudah seharusnya terjadi. Dengan keikut

sertaan masyarakat dalam pelaksanaan operasional pembangunan sangat membantu berjalannya program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa beserta orang Desa. Kerjasama antara masyarakat dan pihak pemerintah Desa yang sangat baik mampu memberikan kemajuan pembangunan yang ada di Desa Patongloan. Adapun keberhasilan pembangunan merupakan tercapainya semua program-program yang sudah direncanakan oleh pihak pemerintah.

Program tidak akan bisa tercapai apabila tidak ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat, sehingga untuk mendapatkan pencapaian yang maksimal masyarakat harus bisa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, baik itu yang bersifat tenaga, pikiran maupun materi. Agar apa yang dilakukan masyarakat dapat termonitoring dengan baik, dan bahkan untuk mengetahui sudah sampai dimana program pemerintah yang telah difasilitasi oleh pemerintah Desa tersebut.

Tahap evaluasi dilakukan dengan adanya partisipasi dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini, masyarakat ikut mengawasi dari laporan kegiatan dari segi program, waktu maupun dana yang digunakan. Evaluasi pada program pembangunan memang seharusnya dilakukan minimal setahun sekali, guna untuk mengetahui perubahan pembangunan baik itu bersifat fisik maupun nonfisik. Kegiatan pemerintah Desa merupakan peran serta masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dibangun, melakukan pemeliharaan serta pemantauan baik dari pihak pemerintah Desa sendiri maupun bersama pihak masyarakat yang ada di Desa Patongloan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahap evaluasi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sudah sangat baik, mereka ikut memberikan informasi terkait dengan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga menikmati serta menjaga hasil-hasil pembangunan Desa.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahap *assessment* atau dalam pengidentifikasian masalah dilapangan, terlihat partisipasi masyarakat dapat dikatakan baik yakni masyarakat telah peka terhadap fenomena serta realita yang sedang terjadi disekitar mereka, bahkan telah memberikan masukan kepada pihak pemerintah akan hal tersebut.
2. Pada tahap perencanaan *alternative program* atau kegiatan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Patongloan, tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh pemerintah desa melainkan dengan melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua.
3. Pada tahap pelaksanaan, hubungan masyarakat dengan pemerintah Desa terkait perencanaan pembangunan sangat baik, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Patongloan, sehingga bisa dikatakan pemerintah berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

4. Pada tahap evaluasi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sudah sangat baik, mereka ikut memberikan informasi terkait dengan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga menikmati serta menjaga hasil-hasil pembangunan Desa.

B. Saran

Dari temuan penelitian disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak pemerintah Desa Patongloan agar lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan lebih giat mengadakan sosialisasi tentang mekanisme dan pentingnya perencanaan pembangunan.
2. Sebaiknya perencanaan pembangunan di Desa Patongloan, terfokus kepada kebutuhan mendesak, yang kemudian dijadikan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan, karena apabila beberapa proyek dijalankan sekaligus akan menimbulkan kebingungan.
3. Pemerintah harus mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan karena masyarakat terkadang banyak yang bekerja.
4. Pemerintah harus proaktif dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya pengawasan dan evaluasi, sehingga masyarakat dapat lebih berperan dalam mengawasi dan bersama-sama mengevaluasi setiap kegiatan, agar mengurangi tingkat kesalahan dalam suatu pengerjaan proyek pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan daerah partisipatif*, pondok edukasi. Solo
- Adisasmita. 2001. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Alfabeta, Bandung
- Amien, Mappadjantji. 2005. *Kemandirian Lokal “Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru”*, PT.Gramedia, Jakarta.
- Bryant Coralie, Louise G. White. 1990. *Manajemen Pembangunan*. LP3ES. Jakarta
- Chambers, Robert. 1996. *Memahami Desa secara Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta
- Dwiyanto, Agus. 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Efendi. 1986. *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat Dalam Pembangunan*. Semarang : IKIP Semarang Press
- Global forum on reinventing government building trust in government. 2006. *Public Administration and Democratic Governance: Governments Serving Citizens*. United Nations Publication, America.
- Geddesian. 2005. *Rural Development Participation*, Cornell University RDCCIS: New York.
- Hasibuan, Malayu, S.P.Drs. 1993. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, CV. Haju Masagung, Jakarta.
- Huntington dan Nelson. 2001. *Manajemen Pembangunan Daerah*. LP3ES. Jakarta
- Iskandar, Mirsa. 1998. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan suatu studi di Desa Cibeusi dan Desa Sayang Kecamatan Cikeruh Kabupaten Sumedang*. Jurnal Publikasi.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.

- Khoirun. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, suatu studi kasus Program Pelaksanaan Partisipasi di Kecamatan Belongbendo Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Publikasi.
- Moleong, Lexi J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.
- Mubiyarto. 1984. *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta
- Nandang, Suherman. 2000. *Pengembangan Partisipatif di Jatinangor*. jurnal jurusan Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB)
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta.
- Nelson Bryant dan White. 1982. *An Introduction to Social Planning In The Third World*, John Willey and Son's: New York.
- Pamudji, S. 1989. *Otonomi Desa*. Jakarta . PT Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminto, Wojowasito W.J.S. 2007. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pohan, M H. 2003. *Sistem perencanaan Pembangunan Nasional: Pokok-pokok pemikiran. Lokakarya Penguat Peran Perguruan Tinggi dalam pembangunan Perencanaan Partisipatif*. Jakarta tanggal 23 Oktober 2003. Jakarta
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Robert. 1996. *Memahami Desa secara Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta
- Sahroni. 2000. *Regulasi Baru, Desa Baru*. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Siagian. 1984. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*
- Siagian, S.P. 1998. *Administrasi pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Slamet. 1994. *Partisipasi di Dalam Lembaga Sosial Desa (LSD) di enarn desa di Kabupaten Boyolali*. Jurnal Publikasi.
- Soemarmo. 2005. *Perencanaan Pembagunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV Cita Utama, Jakarta
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Suharto, Edi. 2002. *Membangun masyarakat Memberdayakan rakyat*, Aditama
- Sutarto, Soediyono dan A.D. Suharsono. 1991. *Organisasi Program Pembangunan Berkelanjutau dengan mengambil kasus proyek dalam Program Pengembangan Wilayah (PPW) di sebuah Kabupaten di Jawa Tengah*. Publikasi Jurnal.

Tapparang, 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.

Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1999. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1998. *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta

Peraturan Undang-undang

UU No. 25 Tahun 2004 tentang *system perencanaan pembangunan nasional* (SPPN)

UU No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Pedoman Wawancara

Untuk Kepala Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang

I. Identitas Diri

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Hari/Tanggal :

II. Pertanyaan penelitian

a. Tahap assesment

1. Bagaimana pendapat anda tentang perencanaan pembangunan desa?
2. Data apa saja yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa?
3. Siapa saja yang dilibatkan dalam pengumpulan data terkait perencanaan murenbang desa?

b. Tahap Perencanaan alternatif program

1. Bagaimana mensosialisasikan prosedur dan manfaat perencanaan musrenbang desa?
2. Seberapa penting pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa?
3. Siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa?
4. Apakah masyarakat yang ikut dalam perencanaan pembangunan memberikan saran atau masukan terkait perencanaan pembangunan desa?

c. Tahap Pelaksanaan

1. Bagaimana hubungan atau kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat desa di Desa Patongloan?
2. Apa saja yang dilakukan pemerintah desa untuk mencapai target perencanaan pembangunan di Desa Patongloan?
3. Program apa saja yang harus melibatkan masyarakat desa di Desa Patongloan?
4. Apakah masyarakat ikut dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah diprogramkan?

d. Tahap Evaluasi

1. Apakah masyarakat ikut memberi masukan/solusi terhadap masalah pelaksanaan yang timbul dalam pembangunan desa?
2. Apakah masyarakat ikut bekerja dalam kegiatan pembangunan desa?
3. Apakah masyarakat ikut memelihara hasil-hasil pembangunan desa?
4. Apakah masyarakat turut menikmati keuntungan/manfaat hasil pembangunan desa?
5. Apakah masyarakat ikut dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan Pembangunan desa?

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Masyarakat Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang

I. Identitas Diri

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Hari/Tanggal :

II. Pertanyaan penelitian

a. Tahap Assesment

1. Bagaimana pendapat anda tentang perencanaan pembangunan desa?
2. Data apa saja yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa?
3. Apakah anda dilibatkan dalam pengumpulan data terkait perencanaan murenbang desa?
4. Apakah anda disampaikan tentang rencana pelaksanaan perencanaan pembangunan desa?

b. Tahap Perencanaan alternatif program

1. Apakah Pemerintah desa telah mensosialisasikan prosedur dan manfaat perencanaan musrenbang desa?
2. Apa yang anda lakukan dalam perencanaan pembangunan desa?
3. Siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa?
4. Apakah anda ikut memberikan saran atau masukan terkait perencanaan pembangunan desa?

c. Tahap Pelaksanaan

1. Bagaimana hubungan atau kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat desa di Desa Patongloan?
2. Apa saja yang dilakukan pemerintah desa untuk mencapai pembangunan masyarakat di Desa Patongloan?
3. Program apa saja yang anda dilibatkan di Desa Patongloan?
4. Apakah anda ikut memberi masukan/solusi terhadap masalah pelaksanaan yang timbul dalam pembangunan desa?

e. Tahap Evaluasi

1. Apakah anda ikut memberi masukan/solusi terhadap masalah pelaksanaan yang timbul dalam pembangunan desa?
2. Apakah anda ikut bekerja dalam kegiatan pembangunan desa?
3. Apakah anda ikut memelihara hasil-hasil pembangunan desa?
4. Apakah anda turut menikmati keuntungan/manfaat hasil pembangunan desa?

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

- a.
 1. Identitas tempat : Desa Patongloan
 2. Alamat : Rante Baba, Desa Patongloan, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang
 3. Waktu pengambilan dokumen: 04 Oktober s/d 03 November 2017
- b. Struktur organisasi Desa Patongloan.
- c. Dokumen yang berhubungan dengan strategi perencanaan pembangunan desa:
 1. Dokumen / arsip yang berhubungan dengan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Patongloan.
 2. Dokumen/foto-foto pelaksanaan musyawarah dan pelaksanaan pembangunan di Desa Patongloan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Lukman

Tempat dan Tanggal Lahir : To'ue, 29 Oktober 1974

Alamat : Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang

Nama Instansi : Kantor Camat Baroko, Kabupaten Enrekang

Alamat Instansi : Jln. Puang Lamban Lako, Bubun Bia

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 121 Tangsa
2. SMP Negeri 3 Mengkendek
3. STM Kartika Bhakti Paldam VII Wirabuana Ujung Pandang

Riwayat Pekerjaan :

1. PNS Sekretaris Desa Benteng Alla Utara (2009-2017)
2. PNS Staf Kantor Camat Baroko (Bulan Oktober 2017-sekarang)